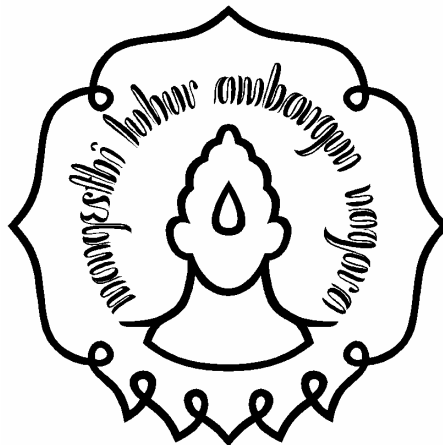


RUMEKSOPURO
lembaga penjaga keamanan mangkunegaran
di era transisi kemerdekaan Indonesia
tahun 1945-1949



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi persyaratan
Guna mencapai gelar sarjana sastra jurusan sejarah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh:

Laela Faiqoh

C 0502028

JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007

RUMEKSOPURO
LEMBAGA PENJAGA KEAMANAN MANGKUNEGARAN
DI ERA TRANSISI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun oleh:

Laela Faiqoh

C 0502028

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing,

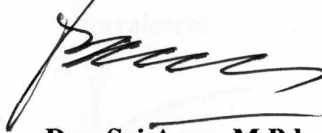


Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd.

NIP. 131 569 257

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Sejarah



Drs. Sri Agus, M.Pd.

NIP. 131 633 901

HALAMAN PENGESAHAN

Diterima dan disetujui oleh Panitia
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pada tanggal: 5 Februari 2007

Panitia Penguji:

Ketua Drs. Sri Agus, M.Pd.

NIP. 131 633 901

Sekretaris Dra. Isnaini Wijaya Wardani, M.Pd.

NIP. 131 472 204

Penguji I Dra. Sawiti Pri Prabawati, M.Pd.

NIP. 131 569 257

Penguji II Bagus Sekar Alam, S.S, M.Si.

NIP. 132 309 447

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Prof.Dr. Maryono Dwiraharjo, S.U.

NIP. 130 675 167

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Laela faiqoh

NIM : C 0502028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “*Rumeksopuro* Lembaga Penjaga Keamanan Mangkunegaran di Era Transisi Kemerdekaan Republik Indonesia (Tahun 1945-1949)” adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda *citasi* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan

Laela Faiqoh

MOTTO

“Sesungguhnya jalan kehidupan berada didepan Anda. Carilah ia melalui ilmu, amal shaleh, dan akhlak yang utama. Jadilah Anda seorang yang bersikap sederhana dalam semua urusan, niscaya Anda akan beroleh kebahagiaan”.

(anonim)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS.Alam Nasyroh:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Bapak dan ibuku tercinta.
- Mas dan mbak iparku serta ponakan-ponakanku (Adam,Aqil,Iqbal&Labib)
- Almamater.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak menemui permasalahan yang menghambat, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta yang dengan sabar dan sepenuh hati membimbing dan memotivasi setiap langkah penulis serta mas Mat dan mbak Likhah beserta Adam, Aqil, Iqbal& Labib.
2. Bapak Prof. Dr. Maryono Dwiraharjo, S.U. selaku dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Drs. Sri Agus, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang dengan sabar, tekun dan teliti membimbing penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Para karyawan dan karyawan UPT. Perpustakaan baik Pusat maupun Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi

pelayanan dan kemudahan dalam peminjaman buku bagi penulis untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Soenarso Pontjosoetjitro selaku informan yang telah membantu penulis memperoleh data dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Kustini Darmawan selaku Kepala Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran dan karyawan-karyawati Reksopustoko Mangkunegaran yang dengan sabar membantu mencari arsip-arsip yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Para dosen jurusan ilmu sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS yang dengan ikhlas menularkan ilmunya kepada penulis.

9. Teman2 sekost: Mami fina (makasih komputernya y), Wely, Nina Kiting, Dheean, Inunk, Prapti Inekke, Intan Babyhuy, Dhinie Bunder, U_nie, Pungky, Silva&fi_Cia (makasih bgt smua....) dan juga teman2 ilmu sejarah '02:ziah & danik (makasih bgt,sobat....), tiwik, yuli, novi, ardi arik, sahid, luhur, wahid, indah, jannnah, imeh, azizah, irma, satir, ian, onnie, wahyu, siswadi dan teman2 lainnya.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik kalian semua mendapatkan balasan dari Allah AWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan sepenuh hati dan tangan terbuka. Akhirnya penulis berharap semoga hasil karya ini bermanfaat khususnya bagi

jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan bagi para pembaca pada umumnya.

Suarakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PRSEMBAHAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
DAFTAR GAMBAR	XVI
ABSTRAK.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	12

H.	Tehnik Analisa Data.....	14
I.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	PRAJA MANGKUNEGARAN.....	16
A.	Berdirinya Praja Mangkunegaran	16
B.	Letak dan Wilayah Kekuasaan Praja Mangkunegaran	20
C.	Birokrasi Pemerintahan Praja Mangkunegaran.....	28
D.	Lembaga Kemiliteran Praja Mangkunegaran	40
BAB III	RUMKSOPURO LEMBAGA PENJAGA KEAMANAN DI PRAJA MANGKUNEGARAN.....	45
A.	Rumeksopuro	45
B.	Latarbelakang Berdirinya Rumeksopuro di Mangkunegaran .	49
C.	Keanggotaan Rumeksopuro dan Kesejahteraannya.....	51
D.	Fasilitas Asrama dalam Rumeksopuro.....	67
E.	Garis-Garis Besar Peraturan dalam Rumeksopuro	71
BAB IV	PERKEMBANGAN RUMKSOPURO DI PRAJA MANGKU- NEGARAN PADA MASA TRANSISI KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1945-1949.....	77
A.	Aktivitas Lembaga Keamanan Rumeksopuro di Praja Mangkunegaran	77
1.	Latihan Para Anggota Rumeksopuro	77
2.	Proses Pelaksanaan Jaga dan Pergantian Jaga	81
B.	Badan Keamanan Lainnya Yang Menjaga Keamanan Wilayah Kota Surakarta.....	86

1. Organisasi Ketentaraan Republik Indonesia	86
2. Badan Pengawas Oedara (B.P.O)	90
3. Organisasi Penjagaan Kampung	92
4. Laskar Rakyat	94
5. Panitia Darurat Keamanan Daerah Surakarta (P.D.K.S) ..	95
6. Polisi Keamanan Surakarta	95
7. Territorial Batallion Surakarta	96
8. Midden Java Raad	97
C. Peranan Rumeksopuro	97
BAB V KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Gaji Rumeksopuro Tahun 1946	61
Tabel 2 Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai Rumeksopuro Bulan Maret 1947	62
Tabel 3 Tunjangan Setiap Bulan dari Pemerintah Pusat Kepada Rumeksopuro	65
Tabel 4 Daftar Rencana Gaji dan Tunjangan Pegawai Rumeksopuro Bulan November 1950	66
Tabel 5 Rencana Latihan Gabungan <i>Gakukotai</i> Tanggal 27 Mei 1945	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian.....	107
Lampiran 2	Curriculum Vitae Informan	108
Lampiran 3	Maklumat Menteri Dalam Negeri	109
Lampiran 4	Pernyataan Pengabdian Praja Mangkunegaran Terhadap RI	110
Lampiran 5	Ketetapan Pemerintah Pusat No 19B/S.D Tahun 1946.....	111
Lampiran 6	Catatan Pendek Para Pembesar Istana Mangkunegaran Tanggal 23 November 1945.....	112
Lampiran 7	Surat Papatihdalem Mangkunegaran No 6112/12 Tentang Rumeksopuro	114
Lampiran 8	Surat Bupati Anom Hamongpraja No 3243/29 Tentang Penjagan Keamanan Istana Mangkunegaran	116
Lampiran 9	Surat Perintah Dewan Pertahanan Daerah Surakarta No 33 .	117
Lampiran 10	Surat Mangkunegaran Kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman	118
Lampiran 11	Surat Mangkunegaran No 668/49 Tentang Ijin Masuk Istana Mangkunegaran	119
Lampiran 12	Surat Pemerintah Mangkunegaran no 5/Rahasia Tentang Instruksi Rahasia D.P.D Surakarta No 1	120
Lampiran 13	Maklumat Pemimpin Daerah Serta Tentara Djawa Tengah .	123
Lampiran 14	Susunan Anggota Rumeksopuro.....	124
Lampiran 15	Daftar Nama Para Pegawai Rumeksopuro Tahun 1947.....	125

Lampiran 16	Daftar Pembagian Kelompok Jaga Dalam Rumeksopuro.....	126
Lampiran 17	Surat Papatihdalem Mangkunegaran No 118/29 Tentang Perga- ntian Jatah Makan Anggota Rumeksopuro Dengan Uang	127
Lampiran 18	Daftar Gaji dan Tunjangan Rumeksopuro	128
Lampiran 19	Surat No 121/I/B Tentang Pembagian Bahan Makanan	132
Lampiran 20	Surat No 550/41 Tentang Jadwal Penjagaan Istana Mangku- negaran	133
Lampiran 21	Peraturan Asrama Cavaleri Rumeksopuro	134
Lampiran 22	Daftar Pegawai Mangkunegaran yang Diijinkan Jalan Malam Pada Saat Darurat	135
Lampiran 23	Surat No 624/29 Tentang Kerjasama Penjagaan Istana Rumeksopuro Dengan Badan Pengawas Udara.....	136
Lampiran 24	Surat Ijin Jalan Malam	139
Lampiran 25	Verslag Conferentie Pamongpraja Kasunanan dan Mangku- negaran	143
Lampiran 26	Laporan Jadwal Piket Jaga Anggota Rumeksopuro.....	145
Lampiran 27	Foto Anggota Rumeksopuro	146
Lampiran 28	Denah Istana Mangkunegaran.....	147

ABTRAKSI

Laela Faiqoh. C0502028. RUMEKSOPURO LEMBAGA PENJAGA KEAMANAN MANGKUNEGARAN DI ERA TRANSISI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-1949. Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2007, 150 halaman.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis yang berusaha mendiskripsikan serta menganalisa tentang sistem keamanan didalam lingkungan istana Mangkunegaran pada masa transisi kemerdekaan Republik Indonesia (masa revolusi kemerdekaan RI tahun 1945-1949). Penelitian ini mengupas tentang (1) apa yang melatarbelakangi terbentuknya *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran (2) bagaimana perkembangan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran pada tahun 1945 sampai dengan 1949 dan (3) apa peranan *Rumeksopuro* dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian historis sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi heuristik, kritik sumber baik intern maupun ekstern, interpretative, dan historiografi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, studi pustaka dan juga dilengkapi dengan tehnik wawancara. Dari hasil pengumpulan data, kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan kronologisnya.

Masalah keamanan pasca proklamasi RI dikumandangkan diseluruh wilayah nusantara menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang telah mendukung pemerintahan RI. Keamanan di dalam pura Mangkunegaran sendiri dipegang oleh *Rumeksopuro*. Perkembangan lembaga ini dipengaruhi kondisi saat itu baik dalam segi jumlah anggota, persenjataan, bahkan kesejahteraan anggota dan semua masalah ini menjadi tanggungan dari pemerintah Mangkunegaran. *Rumeksopuro* juga ikut berperan aktif di masa agresi Belanda II yang sangat mencekam dengan menyediakan tempat berlindung didalam istana Mangkunegaran. Penjagaan lingkungan Mangkunegaran juga mempunyai andil untuk mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah semua tindakan *Rumeksopuro* ternyata dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pemerintah daerah untuk mempertahankan kedaulatan RI dengan tetap menjaga roda pemerintahan Mangkunegaran sebagai pemerintah darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Seluruh organisasi keamanan beserta laskar perujangan lainnya saling bahu membahu dalam mengatasi permasalahan keamanan di wilayah RI. Kerjasama ini dilandasi oleh keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri sepenuhnya dari penjajahan dan menjadi suatu bangsa yang merdeka.

BAB I

PENDAHULUAN

A.latar belakang.

Serbuan pesawat terbang Jepang terhadap kapal-kapal tempur Sekutu di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941 ternyata berhasil menghancurleburkan simbol kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Dengan kemenangan terbukalah jalan bagi Jepang untuk membangun suatu Imperium di Asia. Serangan selanjutnya yang diluncurkan Jepang ditujukan ke wilayah-wilayah lain seperti Filipina, Malaka, Indonesia (saat itu masih disebut Hindia Belanda), Australia dan New Zealand. Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starkenborgh yang mengetahui kondisi semacam ini langsung menyerukan perang terhadap Jepang. Namun, selang waktu yang tidak begitu lama Amerika Serikat berhasil bangkit kembali guna melakukan serangan balasan terhadap Jepang.¹

Memasuki tahun 1944 kekuatan bala tentara Jepang dalam melawan Sekutu mulai tampak mengalami kemunduran dan posisinya pun semakin terjepit terutama setelah kepulauan Saipan yang letaknya tidak jauh dari kepulauan Jepang jatuh ketangan Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Kondisi ini ditambah dengan permasalahan menyangkut moral masyarakat Jepang yang juga menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo dan terpaksa digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso sebagai perdana menteri yang baru. Pada masa pemerintahan Koiso inilah dikeluarkan suatu kebijakan untuk mempertahankan pengaruh Jepang didaerah-daerah yang telah didudukinya berupa janji kemerdekaan yang diberikan di kemudian hari termasuk kepada Indonesia.

¹ P.K.Ojong,2001,*Perang Pasifik*,Jakarta: Penerbit Buku Kompas,.halaman 2.

Jatuhnya pulau Saipan ini ternyata diikuti oleh jatuhnya beberapa pulau lainnya seperti kepulauan Solomon dan kepulauan Marschall sehingga seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai runtuh dan kekalahan Jepangpun sudah ada diambang pintu. Dengan melihat kondisi yang sangat kritis ini pemerintah Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada segera merealisasikan janji kemerdekaan di kemudian hari (janji Koiso) dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan negara merdeka. Dari sidang yang dilakukan oleh BPUPKI yaitu sidang I tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang II tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 menghasilkan sebuah konsep yang diberi nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta.² Dan setelah tugas BPUPKI dirasa selesai maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Junbi Inkai* yang diresmikan tanggal 7 Agustus 1945 dan diberi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia.³

Puncak kekalahan Jepang terjadi dalam pertempuran laut di dekat kepulauan Bismark (1 Maret 1943) dan disusul dengan peristiwa penjatuhan bom atom diatas kota Nagasaki dan kota Hiroshima oleh Sekutu. Pengeboman ini berdampak jatuhnya korban yang tidak sedikit bahkan berefek jangka panjang.

² Marwati Djoened, Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 66.

³ *Ibid*, halaman 77.

Hal ini memaksa kekaisaran Jepang untuk menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan pelaksanaan penyerahaan itu dilakukan diatas galangan kapal perang "MISSOURI" pada tanggal 2 September 1945.⁴ Dan sebagai tindak lanjut dari penyerahan itu, Sekutu mulai mengadakan pelucutan senjata, memulangkan tentara Jepang dan mengadili para penjahat perang. Di Indonesia tugas ini dilakukan oleh pasukan Inggris.⁵

Sementara itu pemerintah *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA) yang bermarkas di Australia berencana untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia dengan cara mengekor pasukan Amerika Serikat yang akan menduduki bekas wilayah Hindia Belanda. Namun, sebelum rencana sepenuhnya dilaksanakan terjadi perubahan strategi dari pucuk pimpinan Sekutu.⁶ Perubahan ini tidak saja membawa akibat besar dalam situasi di Indonesia tetapi juga membawa pengaruh pada kedudukan NICA yang selama ini telah mempersiapkan diri di belakang Amerika Serikat karena tugas dari *South West Pasific Command* di bawah Jenderal Amerika Serikat Douglas McArthur diberikan kepada *South East Asia Command* (SEAC) di bawah komando Louis Mountbatten sehingga tugas Inggris menjadi bertambah dan yang menyebabkan keterlambatan Inggris datang ke Indonesia. Inggris datang secara resmi ke Indonesia tanggal 29 September 1945 setelah dibentuknya *Alliend Forces Netherlands East Indies*

⁴ Cahyo Budi Utama, 1995, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*, Semarang: IKIP Semarang Press, halaman 206-210.

⁵ G. Moedjanto, 1998, *Indonesia Abad Ke 20 jilid I dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Jakarta: Kanisius, halaman 97.

⁶ A.H. Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 5*, Bandung: PT. Anka Bandung, halaman 37.

(AFNEI). Ini menimbulkan kekosongan (*Vacum of Power*) di Indonesia.⁷ Kesempatan ini ternyata tidak disia-siakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia dengan memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di depan gedung di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta yang sebelumnya didahului dengan peristiwa Rengasdengklok.⁸

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia karena setelah itu bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dengan cara merebut dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang baik dengan atau tanpa kekerasan. Pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dengan aparat kekuasaan Jepang terus terjadi dimana-mana sejak berita proklamasi dikumandangkan seluruh pelosok tanah air dan segenap penjuru dunia oleh para pemuda Indonesia melalui media pers dan radio.⁹ Pertempuran itu juga disebabkan oleh sikap pimpinan tentara keenambelas Jepang di Jawa yang tidak pernah mengakui adanya Republik Indonesia karena mereka masih terikat dengan komitmen mereka untuk memelihara status *quo* sejak pimpinan mereka menyerah kepada Sekutu.¹⁰

⁷ Cahyo Budi Utomo, *op.cit.*, halaman 211.

⁸ S.Silalahi, 2001, *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 187.

⁹ Suhartono W. Pranoto, 2001, *Revolusi Agustus Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, halaman 99.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Julianto, 1998, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Indonesia*, Jakarta: PT. Erlangga, halaman 44.

Kedatangan pasukan Sekutu ke pulau Jawa dan Sumatera di bawah komando SEAC pada awalnya disambut netral oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu itu datang dengan membawa orang-orang NICA yang secara terang-terangan ingin menegakkan kekuasaan Hindia Belanda. Sikap Indonesia dengan cepat berubah menjadi curiga bahkan memusuhinya. Situasi ini bertambah buruk sejak NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL di Jakarta, Bandung, dan daerah-daerah lain dan kemudian mencoba memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Di lain pihak pasukan Sekutu juga bersikap tidak menghormati kedudukan Indonesia dan tidak menghormati pimpinan-pimpinan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini sangat ditentang oleh rakyat Indonesia.¹¹

Surakarta merupakan wilayah yang mempunyai aspek historis yang banyak karena kedudukannya sebagai pusat pemerintahan kerajaan Jawa ini sangat menarik penguasa asing untuk menguasainya. Tidak mengherankan jika dalam sejarah Indonesia Surakarta mengalami beberapa pergantian masa pemerintahan mulai dari pemerintahan kerajaan Jawa sampai pemerintahan asing (pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan Bala Tentara Jepang).¹² Ketika kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru Nusantara beberapa daerah yang langsung menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah Indonesia termasuk Surakarta. Sehingga Pertempuran dalam rangka mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang juga dilakukan oleh para pejuang

¹¹ Marwati Djoened, Poesponegoro Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, halaman 123.

¹² Larson, George .D, 1990, *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta:UGM Press, halaman 85.

di Surakarta termasuk oleh pihak Praja Mangkunegaran. Dan untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah Praja Mangkunegaran sendiri, Mangkunegara VIII membentuk suatu badan keamanan dengan nama *Rumeksopuro* dan diantara anggotanya terdapat para eks Legiun Mangkunegaran. Dalam menjalankan tugasnya, badan ini bekerjasama dengan para pemuda Indonesia yang tergabung dalam BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan laskar-laskar lainnya. Dengan pembentukan ini memperlihatkan bahwa secara langsung Praja Mangkunegaran ini juga ikut dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia seperti apa yang telah disebutkan dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

B.Perumusan Masalah.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi pembentukan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran?
2. Bagaimana perkembangan organisasi *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran pada tahun 1945 sampai tahun 1949?
3. Apa peranan pertahanan Mangkunegaran *Rumeksopuro* dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949?

C.Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pembentukan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran.
2. Untuk mengetahui perkembangan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949.
3. Untuk mengetahui seberapa besar peranan *Rumeksopuro* dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

D.Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang ingin diraih dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi untuk menjelaskan tentang situasi perkembangan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran.
2. Sebagai informasi bagi para peneliti yang menaruh minat terhadap tema perjuangan kemerdekaan Indonesia terutama di Surakarta.
3. Untuk menambah tulisan sejarah baru dan memperkaya kajian dalam perbendaharaan ilmu sejarah.

E.Kajian Pustaka.

Data sekunder berupa referensi kepustakaan sangat berguna untuk melengkapi data dan meminimalkan kesalahan dalam penulisan penelitian. Untuk itulah seorang peneliti tidak akan menghasilkan karya penulisan yang baik apabila tidak dilengkapi dengan hasil kajian dari sumber-sumber buku kepustakaan yang ada. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku untuk mengupas permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun sumber-sumber kepustakaan itu adalah sebagai berikut :

Buku yang berisi tentang gambaran dasar sejarah Indonesia sejak sekitar tahun 1300 sampai tahun 1950an yang bersifat naratif dan terprinci yaitu karya M.C. Riclefs yang diterjemahkan oleh Dharmono Hardjowidjono yang berjudul *Sejarah Indonesia Modern* (1994). Buku ini menyebutkan bahwa sejarah tertulis Indonesia sudah dimulai sekitar seribu tahun sebelumnya terbukti dengan adanya prasasti-prasasti seperti prasasti 7 yupa di Kutai, Kalimantan Timur dan sumber-sumber asing lainnya mengenai Indonesia jaman kuno. Sumber-sumber inilah yang dapat menjelaskan perjalanan sejarah Indonesia dari jaman pra Islam sampai dengan jaman kemerdekaan. Buku ini juga lebih menonjolkan sejarah Jawa melebihi daripada semestinya. Hal ini dikarenakan Jawa mempunyai sejarah yang lebih banyak daripada sejarah pulau lainnya dan Jawa menjadi pusat sejarah politik baik selama kurun waktu kolonial maupun kurun waktu kemerdekaan. Oleh karena itu, buku ini dianggap cocok untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembahasan mengenai perkembangan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran.

Buku yang membahas mengenai perkembangan sistem kemiliteran di Praja Mangkunegaran pada abad 19 yaitu karya dari R.M.Sarwanto Wiryosaputro

yang berjudul *Legiun Mangkunegaran* (1978). Buku berisi tentang perkembangan militer di Praja Mangkunegaran sejak masa Mangkunegara I sampai VII. Kekuatan militer Mangkunegaran ini sangat disegani karena selain sebagai alat untuk melegitimasi raja juga sebagai kekuatan untuk menjaga keamanan wilayah Praja Mangkunegaran. Pasukan ini dibentuk oleh kompeni untuk dijadikan penyeimbang kekuatan *Vorstenlanden*. Namun, dalam perkembangannya legiun Mangkunegaran ini pernah dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Meskipun begitu kemampuan para eks legiun sangat berguna dalam mempertahankan kedaulatan RI melalui kerjasamanya dengan BKR.

Buku berjudul *Surakarta Dalam Masa Revolusi Kemerdekaan* (1993) karya dari Dr. Suyatno Kartodirdjo ini merupakan sebuah makalah yang berisi tentang sejarah Surakarta pada abad 19. Pada saat itu daerah Surakarta banyak terdapat perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda dengan penduduk pribumi bertindak sebagai tenaga kerja yang berpenghasilan rendah dan ditambah beban pajak yang besar sehingga kehidupannya sangat memprihatinkan. Kondisi ini tidak berubah malah bertambah parah pada masa pendudukan bala tentara Jepang karena pemerintahan ini melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap Indonesia guna untuk mendukung kebutuhan perang Asia Timur Raya salah satunya dengan mengadakan pengerahan tenaga kerja rakyat (Romusha) di bidang militer. Setelah Jepang mengalami kekalahan dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, orang-orang pribumi hasil pelatihan militer Jepang seperti *Heiho*, *Seinendan*, dan Peta ini digunakan untuk berjuang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia termasuk di wilayah Surakarta.

Buku karya Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono, dan Restu Gunawan yang berjudul *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* (1999). Dalam buku ini dijelaskan tentang perkembangan kerajaan Mataram Surakarta dari abad XVIII sampai XX yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Jawa yang mempunyai peranan yang banyak termasuk dalam melahirkan para tokoh pergerakan nasional. Namun dalam perjalanannya kerajaan ini terbelah menjadi 2 akibat politik *divide et impera* kompeni yaitu kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta. Dan kemudian dari masing-masing kerajaan itu muncul lagi pemerintahan kecil lainnya yakni Pakualaman dan Mangkunegaran. Sehingga buku ini dapat dipakai untuk menjelaskan sejarah awal berdirinya praja Mangkunegaran dan kondisi lainnya di sekitar wilayah Surakarta.

Arsip Mangkunegara VIII No 3458 tanggal 21 Juni 1945 berisi ketentuan akan pentingnya penjagaan keamanan Praja Mangkunegaran dan arsip Mangkunegara VIII No 3459 tanggal 30 November 1945 mengenai pembentukan lembaga keamanan *Rumeksopuro* ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan pokok dalam membahas permasalahan perkembangan *Rumeksopuro* ini. Selain itu penulis juga menyertakan hasil penelitian yang sudah ada yakni karya Y.T.M. Sri Kusmiyati yang berjudul *Perkembangan Militer di Mangkunegaran Pada Masa Mangkunegara I sampai Mangkunegara II* (1989) yang berisi mengenai kajian menyangkut awal pertumbuhan militer di Praja Mangkunegaran yang dilengkapi dengan perkembangannya serta pengaruhnya terhadap bidang politik, perekonomian dan sosial budaya.

Buku-buku diatas tadi sekiranya dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran.

F.Metode Penelitian.

Metode dalam penelitian ilmiah sangat dibutuhkan sebagai prosedur dalam rangka ilmu tersebut sampai pada satu kesatuan pengetahuan, tanpa langkah-langkah tersebut tidak mungkin suatu ilmu dapat menjadi ilmu pengetahuan tapi hanya akan menjadi suatu pengetahuan saja. Sesuai permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah merupakan kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk bantuan secara efektif didalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasilnya dalam bentuk tertulis.¹³

Metode Sejarah ini dalam pelaksanaan meliputi empat tahap. Pertama, Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak di masa lampu dari persoalan yang diteliti. Kedua, kritik sejarah ini ada dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern ini digunakan untuk mengetahui kredibilitas informasi yang diperoleh sedang kritik ekstern digunakan untuk mengetahui orientasi yang diperoleh. Ketiga, interpretasi yaitu langkah dalam menginterpretasikan data-data yang telah melewati proses kritik baik intern maupun ekstern. Dan keempat,

¹³ Nugroho Notosusanto,1978,*Masalah Penelitian Sejarah Suatu Pengalaman*,Jakarta:Yayasan Idayu,halaman 6.

histiografi yaitu proses penulisan hasil penelitian melalui cara merangkai data-data yang diperoleh dengan fakta-fakta yang ada menjadi suatu kesatuan kisah sejarah.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan politik dan sosial sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa dan bilamana peristiwa sejarah itu terjadi melainkan juga mengidentifikasikan bagaimana dan apa yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi dari sudut sosial politik tanpa harus mengabaikan dimensi ruang dan waktu.

Penelitian ini dilakukan di Surakarta yaitu di Praja Mangkunegaran yang merupakan sebuah pemerintahan kecil yang masuk kedalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pernyataan Presiden Sukarno tanggal 19 Agustus 1945 dan pernyataan Mangkunegara VIII atas maklumat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 23 Mei 1946 yang isinya menyatakan bahwa praja Mangkunegaran bersedia berintegrasi dengan Negara kesatuan Republik Indonesia.

G.Tehnik Pengumpulan Data.

1. Studi Dokumen.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dokumen yang sejamin berupa arsip yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini. aArsip-arsip tersebut diantaranya adalah: Arsip Mangkunegara VIII No 3458 tahun 1945 berupa surat keputusan Hamongpraja tanggal 21 Juni 1945 tentang penjagaan keamanan praja Mangkunegaran, Arsip Mangkunegara VIII No 3459 berupa

surat keputusan pepatihdalem Mangkunegaran tanggal 30 November 1945 yang berisi pembentukan *Rumeksopuro*, Arsip Mangkunegara VIII No 3474 tahun 1948 mengenai susunan kepengurusan *Rumeksopuro*, dan Arsip Mangkunegara VIII No 3502 tahun 1948 mengenai garis besar peraturan dalam *Rumeksopuro*.

2. Studi Wawancara.

Studi wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung mengenai bagaimana suatu peristiwa terjadi kepada pelaku sejarah atau saksi sejarah. Dalam penelitian ini tehnik wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen. Namun data yang diperoleh penulis hanya berasal dari seorang informan saja bernama K.R.T. Soenarso Pontjosutjitro. Hal ini dikarenakan informan yang mengetahui dengan jelas mengenai *Rumeksopuro* telah meninggal dunia.

3. Studi Pustaka.

Studi pustaka ini adalah tehnik pengumpulan data melalui sumber-sumber yang tidak sejamin yang berupa artikel atau buku-buku referensi sebagai bahan informasi untuk mendapatkan teori dan data sumber baru sebagai pelengkap dalam menganalisa kajian tersebut. Buku- buku tersebut diperoleh di Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Press Surakarta, Perpustakaan Kasunanan Surakarta, dan Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.

H.Tehnik Analisa Data.

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa sejarah. Sejarah berarti segala sesuatu atau suatu fenomena yang terjadi dimasa lampau. Analisa adalah usaha untuk menganalisa dan menginterpretasikan data-data yang berhubungan dengan topik permasalahan. Dengan demikian, studi ini bukan hanya mempersoalkan masalah apa, dimana, dan bilaman peristiwa itu terjadi tetapi lebih dari itu mencoba untuk mengupas bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi sehingga pada dasarnya studi ini tidak akan mengabaikan prinsip kausalitas serta aspek ruang dan waktu. ¹⁴

I.Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pada bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulis, kajian pustaka, metode penelitian meliputi pendekatan, lokasi penelitian, studi dokumen, studi pustaka, dan tehnik analisa data, dan sistematika penulisan.

Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai pemerintahan Praja Mangkunegaran meliputi berdirinya Praja Mangkunegaran, letak dan wilayah kekuasaan Praja Mangkunegaran, birokrasi kekuasaan Praja Mangkunegaran dan Lembaga kemiliteran Praja Mangkunegaran.

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pedekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 5.

Pada bab III ini penulis menguraikan mengenai sejarah *Rumeksopuro* meliputi latar belakang berdirinya *Rumeksopuro*, struktur kepegawaian *Rumeksopuro*, serta perkembangan kepegawaian dan kesejahteraan anggota *Rumeksopuro*.

Pada bab IV ini penulis menguraikan mengenai perkembangan *Rumeksopuro* meliputi aktivitas dan peranannya dalam masa agresi belanda I dan II. Sedangkan pada bab V ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang penulis letakkan pada halaman lampiran.

BAB II

PRAJA MANGKUNEGARAN

A. Berdirinya Praja Mangkunegaran.

Pertengahan abad 18 kompeni berhasil menduduki pusat-pusat perdagangan di Indonesia dengan menyingkirkan para pesaingnya termasuk Mataram bahkan meluas sampai kedaerah pedalaman. Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad 16 dikenal sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas meliputi hampir seluruh pulau Jawa kecuali Kasultanan Cirebon dan Banten serta daerah kompeni (wilayah yang letaknya diantara kedua kasultanan itu).¹⁵ Kekuasaan yang kuat ini

¹⁵ Metz.Th.M,1939,*Mangkunegara, Analisa Sebuah Kerajaan Jawa*. Terjemahaan M. Husodo,Surakarta:Rekso Pustoko,halaman 1.

menyebabkan banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya takluk kepada kerajaan Mataram. Kerajaan Jawa ini pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Namun, pada masa pemerintahan raja-raja pengganti Sultan Agung yaitu Amangkurat I kejayaan ini berubah menjadi kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya tradisi mantap dalam pengaturan pergantian tahta melainkan tradisi perebutan tahta. Selain itu juga dikarenakan politik penetrasi kompeni kedalam kerajaan Mataram melalui politik *divide et impera*.¹⁶

Sejak masa pemerintahan Amangkurat I wilayah kekuasaan Mataram sedikit demi sedikit mengalami pengurangan karena jatuh ke tangan Kompeni (VOC). Pengurangan itu merupakan dampak perjanjian yang dibuat oleh raja-raja Mataram dengan pemerintah kolonial. Isi perjanjian itu banyak merugikan Mataram karena selain kekuasaannya yang selalu berada dibawah pengaruh Belanda, juga setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh raja Mataram harus sesuai izin dari pemerintah Belanda. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan banyak para pangeran dan bangsawan keraton yang merasa tidak senang sehingga melakukan pemberontakan seperti pemberontakan Trunojoyo (bangsawan Madura). Namun, pemberontakan-pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh kerajaan dengan bantuan Kompeni.¹⁷ Bantuan kompeni itu harus dibayar mahal oleh kerajaan Mataram dengan merelakan wilayah kekuasaannya dikuasai oleh Kompeni sehingga dari waktu ke waktu wilayah kekuasaan

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, 1999, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 jilid I*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 123-125.

¹⁷ Sastrodiharjo, 1987, *Riwayat K.G.P.H. Mangkunegara I*, Surakarta: Rekso Pustoko, 1987, halaman 11.

Mataram menjadi sempit. Pada dasarnya setiap masalah yang diselesaikan dengan bantuan Kompeni akan menimbulkan permasalahan baru sehingga di Jawa banyak sekali terjadi pemberontakan.

Pada peristiwa pemberontakan orang-orang Cina atau *Geger Pacinan* (1741-1743) yang berawal dari Batavia kemudian menyebar ke daerah pantai utara termasuk ke wilayah Mataram ini mendapat dukungan dari golongan bangsawan keraton diantaranya yakni R.M. Garendi (pemimpin pemberontakan dengan gelar Sunan Kuning) dan R.M. Said.¹⁸ Karena *geger pacinan* inilah istana kerajaan Mataram mengalami rusak parah dan terpaksa harus dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta.¹⁹

Pada masa pemerintahan Paku Buwono III, perang saudara di lingkungan Kerajaan Mataram yang biasa dipicu dengan permasalahan mengenai perebutan tahta ini diakhiri dengan perjanjian Gianti yang isinya membagi wilayah Mataram menjadi 2 bagian yang hampir sama besar yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Perjanjian yang di sepakati oleh Pangeran Mangkubumi dan Sunan Paku Buwono III yang disaksikan oleh pihak kompeni ini dilakukan di desa Gianti pada hari kamis tanggal 13 Februari 1755.²⁰ Dengan demikian tujuan Belanda untuk mengurangi kekuasaan dan kekuatan raja-raja Jawa sebagian telah terlaksana. Meskipun perjanjian Gianti telah selesai diadakan bukan berarti

¹⁸ Sumohatmoko, 1940, *Riwayat Mangkunegara I sampai Mangkunegara VII*, Surakarta: Rekso Pustoko, halaman 4.

¹⁹ Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono dan Restu Gunawan, 1999, *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*, Jakarta: CV. Ilham Bangun Jaya, halaman 68.

²⁰ R.M. Mr. A.K. Pringgodigdo, 1938, *Lahir dan Tumbuhnya Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustoko, halaman 6.

keadaan Mataram menjadi aman, namun masih ada pemberontakan lain yang dilakukan oleh R.M. Said yang terus melakukan perlawanan terhadap Kompeni, Sunan Paku Bowono III dan Sultan Hamengku Buwono I. Karena kekuatan R.M. Said tidak mampu menandingi kekuatan musuh maka dengan terpaksa beliau bersedia melakukan perundingan perdamaian. Dengan perantara Gubernur Nicolas Hartingh maka pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga diadakan perundingan antara R.M. Said dengan Sunan Paku Buwono III dan disaksikan oleh Raden Adipati Danurejo sebagai wakil Sultan Hamengku Buwono I. Dalam perjanjian itu R.M. Said diangkat menjadi Pangeran *Miji* bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara atau Mangkunegara I dengan diberi hak-hak istimewa dimana kedudukannya sejajar dengan putra mahkota dan berada langsung di bawah raja serta mendapat tanah lungguh seluas 4000 cacah.²¹ Selain itu Paku Buwono juga menyatakan beberapa larangan bagi R.M. Said diantaranya dilarang mempunyai singgasana, dilarang membuat *bale witana*, dilarang menjatuhkan hukuman mati, dan tidak boleh menanam waringin kembar. Meskipun begitu kerajaan kecil ini memperoleh hak otonomi sehingga dapat menjadi kerajaan yang mandiri. Dilain pihak kompeni mencoba menciptakan sebuah kekuatan penyeimbang dari dua kekuatan yang ada yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dengan memberi hak kepada Mangkunegaran untuk membentuk sebuah pasukan sendiri.²² Dengan disetujuinya perjanjian Salatiga maka itu sebagai tanda awal berdirinya Praja Mangkunegaran.

²¹ 1 jung = 28.385 m² dan terdiri dari 1 kepala ±4 bau atau karya atau cacah dan yang dianggap sebagai pajak tanah adalah 4 cacah.

²² Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahjono dan Restu Gunawan, *op.cit.*, halaman 95-96.

Pangeran Mangkunegaran I meletakkan dasar Tri Darma dalam menjalankan pemerintahannya. Tri Darma ini tidak ditulis secara resmi atau terang-terangan ke dalam sebuah buku atau piagam tapi telah tertanam kuat dihati rakyat Mangkunegaran. Prinsip Tri Darma ini berisi : Pertama, *Rumangsa Melu Andarbeni* artinya tidak boleh merasa hanya menumpang hidup dalam suatu negara tapi harus ikut merasa memiliki dan perlu diterapkan dalam segala tindakan, sikap dan gaya hidup. Kedua, *Wajib Melu Anggondeli* artinya ikut mempertahankan. Prinsip kedua ini mempunyai arti yang luas yakni ikut mengisi, membina, memakmurkan, mamajukan, menstabilkan dan mempertahankan negara dari segala macam hal yang membahayakan keutuhan negara baik dari dalam maupun dari luar. Ketiga, *Mulat Sarira Hanggarsa Wani* artinya mawas diri yakni bersikap berani segi segi positif dalam melangkah dengan segala konsekuensinya.²³

B. Letak dan Wilayah Kekuasaan Praja Mangkunegaran.

Praja Mangkunegaran berdiri tahun 1757 dari hasil jerih payah perjuangan R.M. Said selama kurang lebih 16 tahun dalam perlawanan terhadap Kompeni dan Sunan Paku Buwono III. Sesuai dengan perjanjian Salatiga dimana Mangkunegara I bergelar *Adipati* (seorang patih) maka beliau menempati rumah milik patih Kasunanan yaitu Raden Adipati Sindurejo. Dari sini dapat dilihat bahwa rumah Mangkunegara I tidak dapat dikatakan sebagai sebuah istana karena

²³ Yayasan Mangadeg, 1974, *Tri Darma Tiga Dasar Perjuangan Pangeran Sambernyawa*, Surakarta: Penerbit Seksi Hubungan Masyarakat dan Penerbitan, halaman 13.

tidak dilengkapi dengan tempat-tempat sebagai lambang kebesaraan kerajaan tradisional di Jawa. Meskipun begitu Praja Mangkunegaran memenuhi syarat berdirinya sebuah negara karena telah memenuhi persyaratan terbentuknya sebuah negara yaitu penduduk atau rakyat (*staatvolk*), wilayah (meliputi tanah, air dan udara), dan pemerintahan yang berdaulat (*staatsgezag*).²⁴

Pusat pemerintahan Praja Mangkunegaran ini menempati bekas kepatihan Kasunanan sehingga secara khusus pura Mangkunegaran merupakan wilayah yang sangat penting dalam tatanan pemerintahan Kasunanan dan berada di tempat yang sangat strategis baik dalam segi pemerintahan maupun segi keamanan. Dengan demikian pura Mangkunegaran ini berada tidak jauh dari pusat pemerintahan. Berdasarkan sistem pembagian wilayah kerajaan tradisional di Jawa pada masa lalu wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi 4 yaitu pertama, *Kutagara* yang merupakan daerah inti atau pusat dan disinilah letak sebuah keraton sebagai tempat tinggal raja dan para kerabatnya serta para beberapa pejabat tinggi lainnya. Kedua, *Negara Agung* yang letaknya disekitar *kutagara* dan masih termasuk daerah inti kerajaan karena didaerah ini terdapat tanah *lungguh* para pejabat tinggi di *kutagara*. Ketiga, *Mancanegara* adalah daerah di luar daerah negara agung tapi tidak termasuk daerah pesisir dan biasanya tidak terdapat tanah *lungguh* milik para pejabat tinggi meskipun begitu tiap tahun harus menyerahkan pajak ke keraton. Dan keempat, *Pesisir* yakni daerah yang letaknya

²⁴ M. Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman 27-28.

disepanjang pantai.²⁵ Dengan demikian istana Mangkunegaran masuk kedalam wilayah negaragung yaitu wilayah yang digunakan sebagai tempat tinggal raja dan keluarga-keluarga raja serta para pejabat tinggi kerajaan. Pusat kerajaan itu juga mempunyai fungsi ganda yakni sebagai tempat tinggal raja dan juga sebagai tempat menjalankan roda pemerintahan. Sehingga konsep fungsi ganda ini juga diterapkan dalam istana Mangkunegaran.

Tanda yang digunakan sebagai pembatas antara wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran sangatlah jelas karena diantara keduanya wilayah pemerintahan ini terdapat jalan raya Slamet Riyadi yang membujur lurus dari arah barat sampai kearah timur. Dengan batasan ini dapat dilihat bahwa istana Mangkunegaran berada di wilayah bagian utara sedang Kasunanan berada di sebelah selatannya. Sedang mengenai batasan-batasan kekuasaan Mangkunegaran secara keseluruhan dari kekuasaan Kasunanan tidak terdapat keterangan yang sangat jelas karena sejak terjadinya perjanjian Gianti dan perjanjian Salatiga pembagian wilayah tidak diatur secara jelas termasuk mengenai penambahan atau pengurangan wilayah. Sehingga dengan kondisi semacam ini ada beberapa daerah baik milik Kasultanan, Kasunanan maupun Mangkunegaran yang letaknya terselip diwilayah kekuasaan yang berbeda atau menjadi daerah terasing (*enclave*). Dengan adanya daerah *enclave* ini tidak jarang sering terjadi perang antar desa yang dipicu oleh masalah sengketa tanah.

Berdasarkan perjanjian yang dilakukan R.M. Said (Mangkunegara I) dengan Paku Buwono III tahun 1757, wilayah Mangkunegaran berupa tanah

²⁵ F.A. Sutjipto, 1968, *Struktur Birokrasi Mataram Djaman Kerta Kertasura*, Bandung: Bharata, halaman 53-54.

lungguh seluas 4000 cacah yang diambil dari tanah kekuasaan milik Kasunanan

Surakarta. Diantaranya :

1. Daerah Kedawung	141	Jung
2. Daerah Laroh	115,25	Jung
3. Daerah Matesih	218	Jung
4. Daerah Wiroko	60,50	Jung
5. Daerah Hariboyo	82,50	Jung
6. Daerah Hanggabayan	25	Jung
7. Daerah Sembuyan	113	Jung
8. Daerah Gunung Kidul	71,50	Jung
9. Daerah Pajang sebelah selatan jalan Surakarta – Kertasura	58,50	Jung
10. Daerah Pajang sebelah utara jalan Surakarta – Kertasura	64,75	Jung
11. Mataram	1	Jung
12. Kedu	8,5	Jung
Jumlah		979,50 Jung ²⁶

Batas wilayah kekuasaan Mangkunegaran secara khusus adalah sebagai berikut: dari desa Jurug ke tepi Bengawan Sala menuju ke utara mengikuti aliran sungai sampai pertemuan Kalianyar, kemudian berbelok ke barat kemudian ke selatan lagi sampai di kampung Tegalrejo, hingga ada jalan besar Panggung Balapan sampai di kampung Margoyudan, berbelok ke selatan sampai di Kali Pepe dibelakang kampung Tambak Segaran menuju ke barat sampai rumah sakit

²⁶ G.P. Rouffaer, 1983, *Swaprja (Terjemahan M.H. Pringgokusumo)*, Surakarta: Rekso Pustoko, halaman 10.

Mangkubumen kemudian ke utara sampai jalan kereta api terus mengikuti jalan besar Sala-Kertasura sampai jembatan Kleco.²⁷ Namun, setelah masa kemerdekaan dijadikan dalam satu kecamatan yaitu kecamatan Banjarsari, walaupun begitu terdapat sedikit perubahan dan sekarang daerah-daerah itu berubah nama seperti Keprabon, Timuran, Setabelan, Mangkubumen, Manahan, Gilingan, dan Nusukan.²⁸

Wilayah kekuasaan yang tersebar luas dan tidak teratur itu menimbulkan masalah persengketaan tanah selain itu juga menimbulkan kebingungan mengenai kewarganegaraan masyarakatnya. Untuk itu baik Kasunanan maupun Mangkunegaran sepakat menggunakan peraturan yang didasarkan kebiasaan yang amat tua.²⁹ Penentuan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas waktu atau lamanya orang itu bertempat tinggal disuatu wilayah, sedang peraturan yang lain tidak ada. Peraturan ini tetap diterapkan di masyarakat sampai keluarnya peraturan baru pada tahun 1921 yang di tulis dalam *staatblaad*.

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Mangkunegaran mengalami perubahan mengenai status kepemilikan tanah dari tanah *apanage* biasa menjadi *apanage* yang bersifat turun-temurun. Tanah *apanage* biasa itu sifatnya tidak dapat dijadikan sebagai warisan secara turun temurun karena ini merupakan wujud lain dari gaji yang diberikan raja terhadap para pejabat kerajaan dan seandainya pejabat tersebut meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya maka

²⁷ *Almanak Narpowandowo, 1932*, Surakarta: Boedi Oetomo, halaman 48-49.

²⁸ Radjiman, 1964, *Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat*, Surakarta: Krida, halaman 105.

²⁹ Moh. Dalyono, 1939, *Ketataprajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustoko, halaman 87-88.

tanah *apanage* itu harus dikembalikan kepada kerajaan. Setelah berubah status menjadi *apanage* turun-temurun berarti tanah itu dapat diwariskan kepada anak cucunya, dan tidak bisa ditarik oleh kerajaan. Wilayah Mangkunegaran juga mengalami perubahan berupa penambahan sebanyak dua kali sehingga wilayahnya menjadi bertambah luas.

Penambahan wilayah Mangkunegaran pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Inggris. Saat itu pemerintahan Inggris mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan perlawanan dari Kasultanan Yogyakarta yang dibantu oleh Kasunanan Surakarta sehingga untuk menumpasnya pemerintahan Inggris mendapat bantuan dari Mangkunegaran. Atas bantuan itu Mangkunegaran mendapatkan imbalan berupa tanah seluas 1000 karya atau 240 jung yang diambil dari tanah milik Kasultanan. Menurut Rouffaer rincian tanah tersebut antara lain :

1. Daerah Keduwang	72	Jung
2. Daerah Sembuyan	12	Jung
3. Daerah Mataram	2,50	Jung
4. Daerah Sukowati Bagian Timur	95,50	Jung
5. Daerah Sukowati Bagian Barat	28,50	Jung
6. Daerah Lereng Gunung Merapi Bagian Timur	29,50	Jung
Jumlah		240 Jung ³⁰

Tanah yang diterima Mangkunegaran ini diserahkan oleh Raffles tepatnya tanggal 17 Maret 1832.

³⁰ G.P.Rouffaer, *op.cit.*, halaman 12

Perluasan kedua terjadi ketika masa pengembalian kekuasaan Jawa dari Inggris kepada Belanda. Pada saat itu di Jawa juga sedang terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan dalam usaha menumpas perlawanan rakyat ini Kompeni mendapat bantuan dari Mangkunegaran. Atas kesetiaannya terhadap Kompeni itu maka Mangkunegaran mendapat imbalan tanah lagi seluas 500 karya atau 150 jung termasuk didalamnya adalah daerah Sokawati. Dengan perluasan kedua ini maka luas tanah yang dimiliki Mangkunegaran menjadi 5500 karya.³¹

Perubahan-perubahan lain mengenai tanah juga terjadi di *Kadipaten* Mangkunegaran pada tanggal 26 Maret dan 27 Juni 1813. Perubahan ini dilakukan berdasarkan sebuah surat perjanjian yang menyatakan bahwa Mangkunegaran mendapat ganti rugi dari Sunan sebesar 3825 golden. Hal ini berawal dari adanya kerugian kepada Sunan dan Sultan atas diserahkannya daerah-daerah mancanegara disebelah barat dan timur, untuk itu keduanya menerima ganti rugi. Sultan menerima sebesar 210.000 golden dan Sunan menerima 334.232 golden setahunnya dari Belanda. Kemudian Sultan mendapat tambahan lagi sebesar 225 golden untuk gerbang tol, pasar-pasar dan tempat sarang burung sedang tambahan untuk Sunan adalah sebesar 306 golden untuk penyerahan tanah-tanah *jobo* dan 11.322 golden untuk pasar-pasar, serta 3.383 golden untuk garam kuwu. Jadi bila dijumlah Sultan menerima sebesar 4.456.000 golden setahun dan Sunan menerima sebesar 754.987 golden setahun. Penyempurnaan atas wilayah dilakukan dengan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Mangkunegaran dan

³¹ *Ibid*, halaman 14.

Sultan tanggal 13 Mei 1813 dan disaksikan oleh Residen Nahuys. Hal ini digunakan Mangkunegaran untuk melakukan reorganisasi dalam pemerintahan dan dalam buku berjudul *Vorstenlanden* karya G.P. Rouffer dijelaskan bahwa tanah Mangkunegaran sebanyak 64 jung dari warisan yang ada di Gunung Kidul bagian barat oleh Mangkunegaran diserahkan kepada Kasultanan Yogyakarta dan sebagai ganti ruginya Kasultanan menyerahkan 60 jung desanya yang ada di Sembuyan (daerah disebelah tenggara Sala) sedang Ngawen seluas 0,5 jung milik Mangkunegaran masih tetap di wilayah Yogyakarta. Selain itu Mangkunegaran menerima uang sebesar 2.364 golden dari pemerintah Belanda atas sewa tanah sebesar 8,5 jung di Kedu dan 1 jung di Mataram serta 1 jung di Gunung Kidul.³² Dengan berakhirnya perjanjian ini maka tidak ada lagi perubahan menyangkut tanah baik penambahan maupun penukaran. Sehingga total luas Mangkunegaran sebesar 5500 karya.

Wilayah Mangkunegaran merupakan satu kesatuan menurut fungsinya sehingga dapat dibedakan menjadi 3, antara lain :

1. Tanah yang dapat ditarik pajak dalam bentuk hasil bumi *in natura* misalnya rumput, sirih, padi, kayu minyak dan lainnya. Letak tanah ini tidak begitu jauh dengan Mangkunegaran dan jumlahnya tidak begitu banyak.
2. Tanah yang menghasilkan pajak dalam bentuk uang yang sering disebut tanah *Pamajegan*. Letak tanahnya disemua wilayah Mangkunegaran dan tersebar disemua daerah.

³² *Ibid*, halaman 16.

3. Tanah *lungguh* (*apanage*) dari para *putra sentana* pegawai praja. Tanah *lungguh* ini berada di luar kota Surakarta dan jumlahnya cukup banyak bila dibandingkan dengan golongan tanah yang pertama.³³

Secara sepintas pembagian ini menunjukkan pembagian wilayah yang didasarkan oleh aspek ekonomi. Pembagian ini tidak jauh berbeda dengan pembagian wilayah kerajaan Mataram dimasa lalu hanya saja penggunaan istilahnya yang sedikit berbeda. Misalnya saja istana Mangkunegaran selain sebagai tempat tinggal raja dan para kerabatnya juga sebagai tempat untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga sama dengan kutagara dan konsep daerah *Negara Agung* dalam Mangkunegaran berada disekitar wilayah *Kutagara* yang berupa tanah yang merupakan tempat tinggal para *kawula* serta tanah-tanah penghasil pajak yang letaknya tidak jauh dari istana Mangkunegaran. Sedangkan wilayah yang berada di luar Surakarta juga sebagai tempat tinggal para *kawula* dengan dipimpin oleh seorang *Wedana* yang ditunjuk oleh Pangeran Mangkunegara. Dengan gambaran semacam ini maka jelaslah bahwa wilayah ini dibentuk berdasarkan struktur dari atas ke bawah.

C. Birokrasi Pemerintahan Mangkunegaran.

Struktur pemerintahan dalam suatu negara meliputi beberapa cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga jenis badan ini mempunyai hubungan yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan tugasnya sehingga harus berjalan secara seimbang, serasi dan selaras agar tercipta sebuah

³³ Moh. Dalyono, *op.cit.*,halaman 107.

tatanan pemerintah yang baik.³⁴ Pada Praja Mangkunegaran ini struktur birokrasi tampak terlihat jelas pada masa pemerintahan Mangkunegara III. Ini dikarenakan pada awal berdirinya Praja Mangkunegaran kondisi baik *intern* maupun *eksternnya* masih belum stabil apalagi disekitarnya masih diwarnai dengan peperangan sehingga susunan tata pemerintahan masih bersifat sederhana dan praktis serta diprioritaskan untuk pembentukan pasukan perang. Semua tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintahan dipegang oleh Mangkunegara. Selama masa pemerintahan Mangkunegara I sampai Mangkunegara III terus dilakukan upaya penyempurnaan dan perubahan dalam pemerintahan. Dan akhirnya pada masa Mangkunegara III struktur pemerintahan sudah terbentuk dengan jelas.

Struktur birokrasi ini biasanya dipegang oleh orang-orang dari kalangan para putra sentana dan kerabat kerajaan lainnya atau dikenal dengan sebutan para *priyayi*.³⁵ Pada masa itu paham feodalisme masih tertancap kuat dikalangan masyarakat Jawa dimana masyarakat terbagi menjadi beberapa lapisan yakni :

1. Golongan pertama meliputi raja dan para kerabat raja.
2. Golongan kedua yakni para pejabat tinggi kerajaan (*abdi dalem*), dan
3. Golongan rakyat jelata.

Untuk menentukan posisi seseorang dalam suatu kelompok diperlukan dua kriteria. Pertama, prinsip kebangsawanan ditentukan oleh hubungan darah seseorang dengan penguasa. Kedua, posisi seseorang dalam hierarki birokrasi

³⁴ M.Solly Lubis, *op.cit.*, halaman 104.

³⁵ Sartono Kartodirdjo, A. Sudewa, dan Suhardjo Hatmosuprobo, 1993, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: UGM Press, halaman 4-25

seseorang yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut dianggap termasuk golongan elite sedang seseorang yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut maka termasuk golongan rakyat biasa.³⁶ Selain itu kedudukan *priyayi* dapat dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan pada asal usulnya, antara lain :

1. *Priyayi* karena keturunan.

Kelompok ini merupakan kelompok para bangsawan atau para *putra sentana* karena kelompok ini masih mempunyai hubungan darah dengan raja yang berkuasa. Termasuk dalam kelompok ini dalah para anggota keluarga dan kerabat kerajaan.

2. *Priyayi* karena jabatan dalam struktur pemerintahan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan raja memerlukan banyak pembantu. Pembantu dibidang pemerintahan inilah disebut *abdi dalem* dan ini dimulai dari jabatan patih sampai dengan *jajar*. Kelompok *priyayi* jenis ini dapat berasal dari golongan *priyayi* aristokrat (*priyayi* karena keturunan) dan *wong cilik* (orang biasa). Asas keturunan dalam struktur pemerintahan telah ditetapkan secara tegas dengan undang-undang yaitu *Regeeringsreglement* pasal 69 ayat 4 (sesudah tahun 1925 *Indishe Staatsregeling* pasal 126 ayat 4). Ini seakan tidak dapat dimasuki oleh golongan orang biasa. Mereka yang termasuk orang biasa dalam memasuki jenis kelompok ini harus melalui jalan panjang yakni melalui *ngawula*, *suwita* atau *ngenger* yang artinya mengabdikan diri pada seorang *priyayi* atau seorang pejabat pemerintah kerajaan. Setelah beberapa tahun *ngenger* dan dianggap baik maka oleh majikannya

³⁶ Dwi Ratna, Tugan Triwahyono, dan Restu Gunawan, *op.cit.*, halaman 28.

dimagangkan di kantornya. Dengan cara magang inilah maka terbukalah jalan untuk menjadi *priyayi*.³⁷

3. *Priyayi* karena perkawinan.

Perkawinan juga dapat digunakan sebagai alat untuk merubah status sosial seseorang. Namun, hal ini akan membawa perubahan yang mencolok apabila seorang bangsawan tinggi menikah dengan orang biasa dan ini jarang terjadi di kalangan *priyayi* aristokrat.

4. *Priyayi* karena anugerah.

Anugerah kepriyayian ini dapat diperoleh karena kesetiaan, kemampuan, atau jasa seseorang kepada raja dan kerajaan.³⁸

Pada masa Mangkunegara III pemerintahan terbagi menjadi beberapa departemen, antara lain :

1. Kepatihan.

Kepatihan merupakan pemerintahan pusat di sebuah kerajaan dan Mangkunegaranpun memiliki departemen ini. Kepatihan ini dipegang oleh seorang patih yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang *kliwon* yang mana dalam struktur organisasi juga bertindak sebagai kepala kantor kepatihan.

2. Dinas dalam Pura (dinas istana).

Departemen ini bertugas mengurus berbagai macam kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pribadi Praja Mangkunegaran.

³⁷ Sartono Kartodirdjo, A. Sudewa, dan Suhardjo Hatmosuprobo, *op.cit.*, halaman 6.

³⁸ Rajiman, 1991, *Masyarakat Jawa*, Surakarta: Fakutas Sastra dan Seni Rupa UNS, halaman 244-248.

3. Pangreh Praja (pemerintah daerah).

Pemerintah daerah ini berada di bawah pimpinan seorang *Wedana* yang juga sekaligus bertindak sebagai *Wedana Gunung*.

4. *Panekar Wedana Gunung*.

Panekar wedana gunung ini bertugas sebagai perantara antara patih dan *wedana* sehingga jabatan ini ditempatkan di wilayah kota.

5. Kepolisian di daerah (kepolisian Gunung).

Tugas kepolisian pada umumnya adalah untuk menjaga keamanan suatu wilayah agar tercipta suatu lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram. Istilah untuk kepolisian di wilayah kota adalah *Jineman*.

6. Pengadilan.

Pengadilan dalam kerajaan di Jawa terbagi dalam 3 bagian yakni pengadilan surambi, pengadilan perdata, dan pengadilan agama atau yang disebut sebagai *yogiswara*.

Departemen diatas bertindak sebagai pokok struktur pemerintahan dan kemudian dari masing-masing departemen itu dibentuk organisasi penanggungjawabnya, diantaranya :

1. Bupati.

Dalam struktur pemerintahan jabatan bupati ini bertugas untuk memerintah kepada bawahannya setelah menerima perintah dari patih.

2. *Wedana*.

Jabatan *Wedana* ini berada di bawah bupati dan bertugas sebagai penanggungjawab akan kelancaran dalam pelaksanaan suatu tugas pemerintahan dan juga bertindak sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugas itu (tugas operasional).

3. *Kliwon*.

Jabatan ini berada dibawah *Wedana* namun dalam pengangkatannya tidak ditunjuk oleh *Wedana* melainkan oleh bupati dan seorang *Kliwon* mendapat upah berupa tanah *lungguh* seluas 2000 *karya*.

4. *Panewu*.

Kedudukan *Panewu* ada dibawah *Kliwon* dan bertugas untuk menjalankan perintah dari *Kliwon* yang kemudian diteruskan kepada bawahannya. Upah *Panewu* berupa tanah *lungguh* seluas 1000 *karya*.

5. *Mantri*.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *Mantri* ini harus bersifat tegas dan memiliki kepribadian antara lain: Pertama, dapat membedakan antara perbuatan baik dan buruk (*nista*). Kedua, bergaya hidup cukup (*madya*), dan ketiga lebih mengutamakan hal-hal penting menyangkut tugas dan masyarakat umum (*utama*).

6. *Lurah*.

Lurah ini bertindak sebagai kepala desa dan bertugas menjalankan perintah dari *mantri* yang berkedudukan di *Kawedanan*.

7. *Bekel*

Jabatan *Bekel* bertugas menangani pelaksanaan pekerjaan dalam suatu bagian wilayah tanggungjawab lurah dan bertanggungjawab kepada lurah atas pelaksanaan kerja dari *Jajar* serta bertanggungjawab dalam penggunaan tanah *lungguh*.

8. *Jajar*.

Jajar merupakan jabatan yang paling rendah karena bertugas menerima pekerjaan dari *Bekel*.³⁹

Kawedanan sendiri mempunyai beberapa *kemantren* yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut tugasnya masing-masing, diantaranya adalah :

a. *Kawedanan Hamongpraja*, pembantunya semua *Wedana* dan *Kemantren*-nya terdiri dari :

1) *Sasatralukita*, pekerjaannya menulis dan menghitung. Adapun kewajiban *Kemantren Sasatralukita* adalah mengetahui tutur kata dan mengetahui kesastraan serta menyimpan rahasia surat. Anak buahnya adalah para *Carik*.

2) *Sastrapustaka (Reksopustoko)*, pekerjaannya merawat dan menata surat-surat penting. Kewajibannya adalah mengingatkan para *Bekel* mengenai perilaku yang biasa berlaku di Praja Mangkunegaran dan juga berkewajiban menyimpan rahasia. Anak buahnya adalah *Wimbasara* (pesuruh) kantor *panirat*.

3) *Pamongsiswa*, Pekerjaannya melatih kepandaian dan kesusastraan, kewajibannya adalah menuntut ilmu, anak buahnya antara lain: guru,

³⁹ Moh. Dalyono, *op.cit.*,halaman 147.

murid, tukang gambar, tukang *Ngekar* yang ada di Mangkunegaran, semua *Kawedanan Hamongpraja* termasuk *ordenas* dan juru tulis *Eropa*, para *emban* dan sebagainya diserahkan kepada patih.

b. *Kawedanan Reksoprojo*, pembantunya anggota *Rat Pradata* dan *kemantrern*-nya terdiri dari :

- 1) Polisi, Pekerjaan polisi yakni menerima laporan perkara, kewajibannya menjalankan isi surat instuksi dan membantu masyarakat, anak buahnya adalah *Carik*, kepala kampung, *Langsir* (prajurit berkuda dan bersenjata tombak), *Wimbasara* bawahannya para *Wedana Gunung*.
- 2) *Margatama*, Pekerjaannya adalah memperbaiki jalan, tanggul, jembatan, pos ronda, gardu, tapal batas, dan *palengkung* di wilayah Mangkunegaran. Kewajibannya memeriksa yang sudah disebutkan tadi dengan sungguh-sungguh dan juga melaporkan kepada pemerintah mengenai apa yang dilihat, didengar, dan segala hal yang mencurigakan. Anak buahnya adalah *Margayuda Nagara*, *Juru Karya Peksa*, dan bawahan *Margayuda Desa*.
- 3) Jaksa, Pekerjaannya adalah memberi keadilan orang yang berselisih dan kewajibannya adalah menjalankan isi surat peraturan dan *Istijiyad* negara, dan memimpin pengadilan. Anak buahnya adalah *Palidhari*, *Sarayuda*, *Carik*, dan *Reksa Kunjara* (penjaga penjara).

c. *Kawedanan Kartapraja*, pembantunya adalah *Hoofd Administratur* dan *kemantren*-nya terdiri dari :

- 1) Karta Usaha atau para administratur. Pekerjaannya adalah bekerja dan kewajibannya adalah mengusahakan kenaikan penghasilan dengan mudah.

Anak buahnya yaitu orang tanah desa *Pakopen* (perkopian) dan *Patebon* (pertebuan).

2) *Martanimpuna*, Pekerjaannya adalah menerima uang pajak dan uang *anginan* (milik orang banyak) milik negara, *kerigaji*, dan sebagainya, yang kemudian diserahkan kepada *Gedhong*. Kewajibannya adalah tidak merugikan pemerintah, mengetahui jumlah tanah *pamajegan* dan penghasilannya, maupun penghasilan yang lain. Anak buahnya adalah *Juru Timbang*, *Juru Gedhong*, *Juru Tulis*, *Langsir*, *Angginan* (*punggawa pulisi*) *Rangga Sewaka* dan tanah *pamajegan*.

d. *Kawedanan Martapraja*, hanya mempunyai satu pembantunya yaitu: *Reksahardana*, pekerjaannya adalah merawat dan mengetahui jumlah uang yang ada di *Gedhong*, dan di tempat lainnya, serta memasukkan dan mengeluarkan uang. Kewajibannya adalah menghitung dan mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran uang, dan segera melaporkannya kepada pemerintah, apabila ada keterlambatan dan kekurangan keluar masuknya uang yang belum jelas. Anak buahnya adalah *Nitiwara*, *Carik*, dan tukang menghitung uang.

e. *Kawedanan Kartipraja*, hanya mempunyai satu *kemantren* yaitu: *Kartipura*, pekerjaannya adalah memelihara kota dan lainnya termasuk menangani masalah kebakaran rumah. Kewajibannya adalah memeriksa kota dan sebagainya secara rutin dan bisa memperkirakan panjang pendeknya pekerjaan. Anak buahnya adalah *Bramataka*, tukang batu, juru taman, *Undhagi* (tukang kayu), pande besi, *Pangangsu* (tukang menimba air),

penyapu, *Jaga Piara Narajomba*, *angginan*-nya adalah penjaga kuburan raja dan *Wiratana*.

f. *Kawedanan Reksawibawa*, *kemantren*-nya terdiri dari :

- 1) *Reksowarasta*, pekerjaannya adalah menyediakan dan menjaga senjata. Kewajibannya adalah mengetahui seluk beluk keris, bentuk dan besinya, serta bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Anak buahnya adalah *Panyrigan* (tukang keris), *Mranggi* (tukang membuat sarung keris), *Tukang bedil* dan *Tukang popor*.
- 2) *Reksawahana*, pekerjaannya adalah memelihara semua kendaraan dan seluruh perlengkapannya. Kewajibannya adalah mengetahui seluk beluk kuda dan *rajanari*. Anak buahnya adalah *Panegar* (tukang menunggang kuda), *Gamel* (tukang merawat kuda), *Kusir*, *Kenek*, *Tunggon* (tukang mengembala kuda), *Tukang Samak* (tukang membuat tikar), *Pambelah* (penunjuk jalan), dan *Juru Mudi*.
- 3) *Langenpraja*, Pekerjaannya adalah menjaga, membersihkan dan merawat gamelan serta wayang. Kewajibannya adalah memahami *gendhing* dan tembang, mengetahui *Laras* dan bisa menghibur orang. Anak buahnya adalah *Dhalang*, *Panyumping*, *Niyaga*, *Gendhing*, *Badut*, *Tledhek*, dan *Kalawija*.
- 4) *Reksa Busana*, pekerjaannya adalah menyimpan dan menyediakan pakaian dan perhiasan prajurit. Kewajibannya adalah mengetahui ukuran yang tepat dan memantas perhiasan. Anak buahnya adalah *Panongsong* (tukang

membuat payung), *Greji* (penjahit), *Jait* (penjahit), *Kemasan* (tukang membuat emas), *Tukang Gebeg* (tukang gosok emas), dan *Malaten*.

g. *Kawedanan Mandrapura*, hanya mempunyai satu pembantu sedang *kemantren*-nya terdiri dari :

- 1) *Mandrasasana*, pekerjaannya adalah merawat dan membersihkan perabot rumah sedang kewajibannya adalah merakit dan menghias. Anak buahnya adalah *Rengga Sasana* dan *Reksa Gathita*.
- 2) *Reksapradipta*, pekerjaannya adalah menghidupkan dan merakit tempat lampu sedang kewajibannya adalah menjaga, membersihkan dan mengetahui perlengkapan lampu. Anak buahnya adalah *Reksa Panyuta*.
- 3) *Subapandya*, pekerjaannya adalah merawat perlengkapan minum sedang kewajibannya adalah memperkirakan jamuaan yang pantas dan mengetahui macam-macam minuman. Anak buahnya adalah *Wignya Sunggata* (ahli dalam perjamuan), dan *Tukang Pereresan* (tukang memerah susu sapi).
- 4) *Reksasunggata*, pekerjaannya adalah menyiapkan hidangan dan merawat perlengkapan makanan. Kewajibannya adalah mengetahui urutan makanan yang akan disajikan dan mengenali rasa makanan. Anak buahnya adalah *Tukang Sepen* (pelayan), *Koki* (tukang masak), *Panantu* (tukang Menyetrika), dan tukang cuci piring.

h. *Kawedanan Purabaksana*, *kemantren*-nya terdiri dari :

- 1) *Reksabaksana*, pekerjaannya adalah membereskan dan membagi makanan dan kewajibannya adalah menghemat dan mengetahui asal usul dan untuk

siapa makanan itu dibagikan, dan mengetahui takaran. Anak buahnya adalah *Madhaharan* (tukang masak), *Carik Gedhong* (beras, arang, lenga, kayu untuk masak), *Juru Taker*, *Katepon*, *Sayang*, dan *Kundhi* (tukang gerabah).

- 2) *Wreksapanadya*, pekerjaannya adalah melayani permintaan kayu jati yang digunakan untuk perhiasan rumah dan kewajibannya adalah mengetahui ukuran, mengetahui mudah sulitnya tempat, dan memelihara hutan jati. Anak buahnya adalah *Blandhong* (penebang kayu), yang menyediakan kayu untuk masak dan arang.
- 3) *Tarulata*, pekerjaannya adalah membagi persediaan sirih, rumput dan padi. Kewajibannya adalah mengetahui takaran tanah dan pemakaian biaya yang benar. Anak buahnya adalah *Pangrembe*.

i. *Kawedanan Yogiswara*, kemantren-nya terdiri dari:

- 1) *Ketib*, pekerjaannya adalah menikahkan orang yang akan menikah, merawat mayat dan menyelesaikan perkara yang sampai ke *Surambi*. Kewajibannya adalah menjalankan hukum Islam dan *Istijiyad* negara. Anak buahnya adalah *Suragama*.
- 2) *Naib*, pekerjaannya adalah menikahkan orang yang akan menikah, dan berwenang menyelesaikan perkara mengenai perceraian, wasiat, dan ahli waris dengan damai, serta menyuntik cacar dan merangkap sebagai *Katin* (istrinya disebut *Katinah*). Kewajibannya adalah menjalankan hukum

Islam dan *Istijiyad*. Anak buahnya adalah *anginan* para *kaum* yang ada di desa-desa.

- 3) *Mardikan*, pekerjaannya adalah mengajar agama dan mengaji, serta menjaga makam dan *Patilasan* (tempat keramat) dan kewajibannya adalah mentaati agama.
- 4) *Ulama*, pekerjaannya adalah berdoa meminta keselamatan rakyat dan segala hajat sedang kewajibannya adalah pandai dalam hal lafal dan makna, serta *murad* (arti).

Adapun semua *Wedana* tadi, tugasnya menjadi penasehat serta mengetahui dan melaksanakan pekerjaan *Kemantren*-nya sendiri-sendiri dengan semua anak buahnya, kewajibannya mencintai dan menjaga rakyat, melaksanakan kehendak dan bertanggung jawab atas wilayahnya.⁴⁰

D. Lembaga Kemiliteran Praja Mangkunegaran.

Lembaga keprajuritan di Praja Mangkunegaran terbentuk bersamaan dengan dengan berdirinya Praja Mangkunegaran. Pada awalnya R.M. Said menghimpun sebuah kekuatan keprajuritan untuk dijadikan kekuatan dalam melakukan perlawanan terhadap Kompeni, Sunan Paku Bowono III, dan Sultan Hamengku Buwono I. Dan setelah diadakannya perjanjian Salatiga maka R.M. Said diangkat sebagai *pangeran Miji* dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara dan mendapat tanah *lungguh* seluas 4000 cacah beserta hak-hak istimewa lainnya. Karena ingin menciptakan sebuah kekuatan

⁴⁰ S.Margana, 2004, *Keraton Surakarta dan Yogyakarta* (1769-1874), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 379-384.

penyeimbang antara Kasunanan dan Kasultanan maka Kompeni memberi hak untuk membentuk pasukan sendiri bagi Mangkunegaran. Pasukan Mangkunegaran ini lebih dikenal dengan sebutan *Legiun Mangkunegaran*.

Pasukan Mangkunegaran ini ketika masih melakukan perlawanan terhadap Kompeni terdiri dari :

1. *Ladrang Mangungkung Estri* : 60 berkuda, *karbin wedung*.
2. *Jayeng sastra* : 44 berkuda, keris.
3. *Bijingan* : 44 berkuda, keris.
4. *Kapilih* : 44 berkuda, keris.
5. *Taramrudita* : 44 berkuda, pedang.
6. *Margarudita* : 44 berkuda, pedang.
7. *Tanuastra Nampil* : 44 berkuda, keris.
8. *Mijen* : 44 berkuda, panah, keris.
9. *Nyutrayu* : 44 berkuda, panah, keris.
10. *Gulanggula* : 44 darat, panah, keris.
11. *Sarageni* : 44 darat, panah, keris.

Setelah berdirinya Praja Mangkunegaran maka pasukan tersebut ditambah lagi, diantaranya adalah :

1. *Trunakroda* : 44 darat, keris, pedang.
2. *Trunayudaka* : 44 darat, keris, pedang.
3. *Minakan* : 44 darat, keris, pedang.
4. *Tambakbana* : 44 darat, keris, pedang.
5. *Tambakbrata* : 44 darat, keris, pedang.

6. *Dasawani* : 44 darat, keris, *cengking*.
7. *Dasarambat* : 44 darat, keris, *cengking*.
8. *Prangtandang* : 44 darat, panah, *lawung*, kris.
9. *Tirtasana* : 44 darat, panah, *lawung*.
10. *Gunasemita* : 44 darat, panah, *slam*, keris.
11. *Gunatalikrama* : 44 darat, panah, *slam*, keris.
12. *Ciptamiguna* : 44 darat, panah, keris.
13. *Sabdamiguna* : 44 darat, panah, keris.
14. *Dasamuka* : 44 darat, panah.
15. *Dasarat* : 44 darat, panah.
16. *Maranggi* : 44 darat, tombak separo, senapan
separo.
17. *Nirbita* : 44 darat, tombak separo, senapan
separo.
18. *Trunaduta* : 44 darat, tombak, *gambuh*.
19. *Trunasura* : 44 darat, tombak, *gambuh*.
20. *Handakalawung* : 44 darat, senapan.
21. *Handakawatang* : 44 darat, senapan.
22. *Kauman* : 44 darat, bandil.
23. *Danuwiratana* : 44 darat, *bandil*.
24. *Danuwirapaksa* : 44 darat, *bandil*.
25. *Madyautama* : 44 darat, panah, keris, *carabali*.
26. *Madyaprabata* : 44 darat.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 27. <i>Madyapratala</i> | : | 44 darat. |
| 28. <i>Madyaprajangga</i> | : | 44 darat |
| 29. <i>Katawinangun</i> | : | 44 darat, panah, <i>pentung</i> . |
| 30. <i>Purwawinangun</i> | : | 44 darat, panah, <i>pentung</i> . |
| 31. <i>Singakurda</i> | : | 88 darat, <i>lawung</i> , <i>sulam</i> . |
| 32. <i>Brajawani</i> | : | 44 darat, <i>lawung</i> . |
| 33. <i>Maradada</i> | : | 44 darat, <i>lawung</i> . |
| 34. <i>Prawirarana</i> | : | 44 darat, <i>lawung</i> . |
| 35. <i>Prawirasakti</i> | : | 44 darat, <i>lawung</i> . |
| 36. <i>Sanaputra</i> | : | 88 berkuda, <i>karbin</i> , <i>keris</i> ,
<i>anggaran</i> . ⁴¹ |

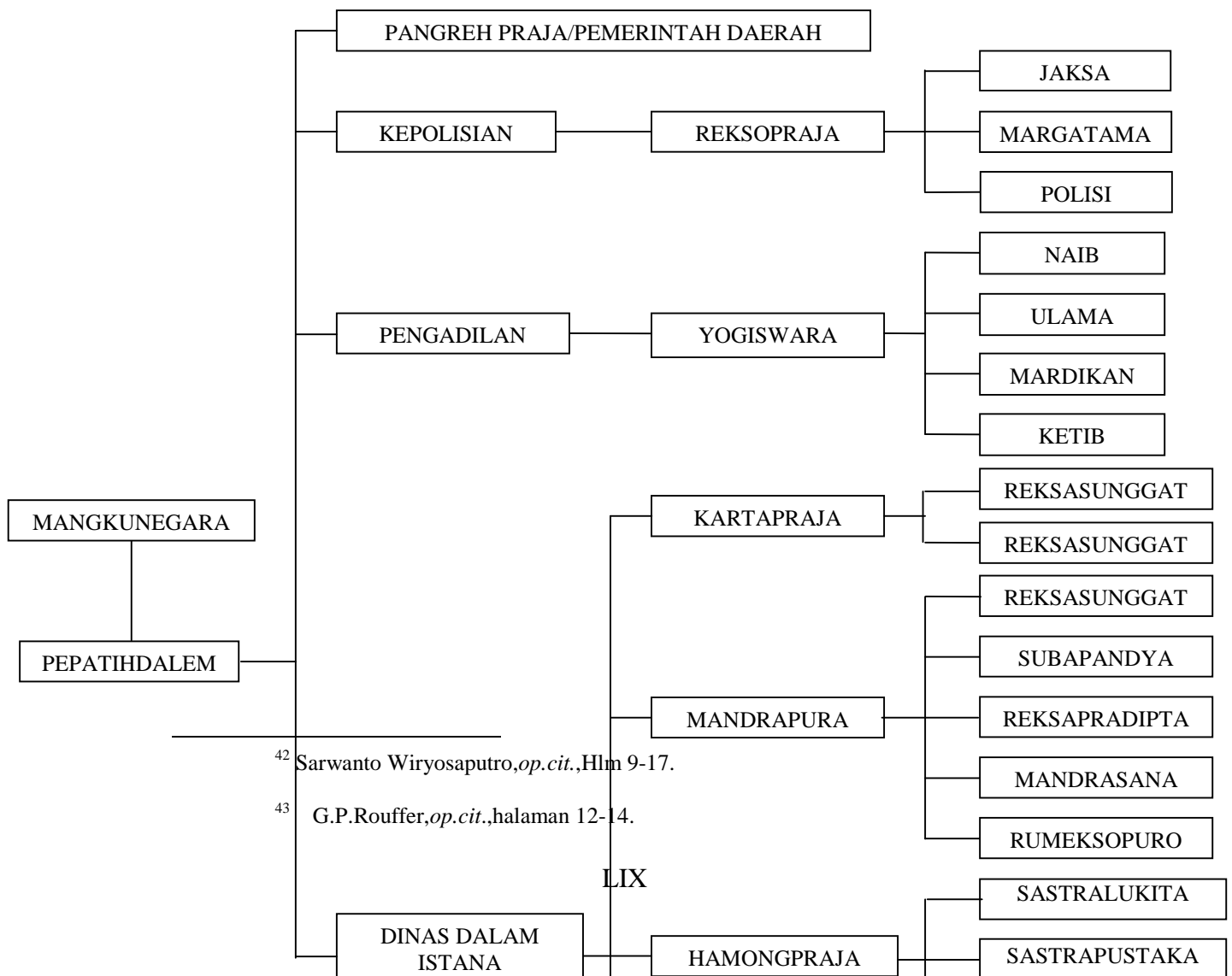
Pasukan ini terus mengalami perkembangan yang cukup pesat karena mendapat perhatian dari pemerintah Belanda yang berwujud pemberian dana subsidi. Dalam struktur organisasi legiun ini tidak lagi menggunakan sistem tradisional tapi sudah menggunakan sistem Eropa. Ini dikarenakan masuknya pengaruh kolonial Belanda kedalam kadipaten Mangkunegaran. Pada tahun 1835 melalui *akte van verband* Mangkunegara III diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai komandan legiun dengan pangkat kolonel dan selanjutnya pada masa Mangkunegara IV dilakukan reorganisasi dalam legiun serta mulai berikan pelatihan-pelatihan militer bagi para anggotanya agar diperoleh tenaga militer

⁴¹ Sarwanto Wiryosaputro, 1978, *Legiun Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustoko, halaman 48

yang tangguh dan siap diterjunkan ke medan peperangan. Ini menunjukkan semua hal yang ada dalam legiun dijalankan dengan menganut konsep Eropa.⁴²

Legiun Mangkunegaran ini selain digunakan untuk kekuatan Mangkunegaran dalam menghadapi musuh terkadang juga digunakan untuk membantu pemerintah kolonial dalam membrantas beberapa pemberontakan di seluruh wilayah kekuasaan Belanda. Pengerahan kekuatan pasukan ini dianggap sebagai tanda akan kesetiaan Mangkunegaran terhadap Belanda sehingga nantinya Mangkunegaran mendapat imbalan berupa perluasaan tanah *lungguh*.⁴³

Berikut ini adalah bagan birokrasi Praja Mangkunegaran tahun 1945:



BAB III

***RUMKSOPURO* LEMBAGA PENJAGA KEAMANAN**

DI PRAJA MANGKUNEGARAN

A. *Rumeksopuro.*

Praja Mangkunegaran sudah lama mengenal bidang kemiliteran karena bidang ini merupakan sarana yang digunakan oleh R.M. Said dalam berjuang melawan musuh. Dalam perjanjian Salatiga yang menjadi sejarah awal berdirinya Praja Mangkunegaran, pemerintah Belanda memberi dukungan atas pembentukan pasukan Mangkunegaran dan dikenal dengan sebutan Legiun Mangkunegaran. Selanjutnya Legiun Mangkunegaran ini berkembang dengan baik karena mendapat bantuan subsidi dan latihan dari pemerintah Belanda.⁴⁴

Namun pada masa pemerintahan Jepang, militer Mangkunegaran mengalami penurunan karena pemerintah Jepang melarang segala bentuk organisasi politik masyarakat pribumi dan berusaha melucuti semua persenjataan milik rakyat termasuk persenjataan milik pasukan Mangkunegaran. Kebijakan ini menyebabkan pasukan militer Mangkunegaran hanya berkedudukan sebagai *abdidalem* penjaga istana saja dan nama legiun Mangkunegaran berubah menjadi *Worontono*.⁴⁵

⁴⁴ Sarwanto Wiryosaputro, *op.cit.*, halaman 1-87.

⁴⁵ Wawancara dengan K.R.T. Soenarso Pontjosoetjito pada tanggal 25 September 2006.

Kekalahan Jepang melawan Sekutu ini membawa angin segar bagi bangsa Indonesia. Disaat terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia inilah para tokoh pergerakan nasional beserta para pemuda mengambil kesempatan untuk memproklamasikan diri menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai ini tidak dapat diganggu gugat sehingga bangsa Indonesia siap dan rela berkorban baik jiwa, raga maupun harta benda demi mempertahankan kemerdekaan tersebut.⁴⁶

Masa revolusi merupakan masa yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Pada masa ini bangsa Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman dari pihak pemerintahan Belanda (NICA) saja tapi juga harus menghadapi kondisi dalam negeri yang masih belum stabil. Perkembangan perekonomian Indonesia yang buruk dan tingkat kesejahteraan yang kurang ini menyebabkan perkembangan politik negara yang baru berdiri ini selalu mengalami perubahan yang tidak menentu. Kondisi Indonesia yang kacau ini juga dimanfaatkan oleh Front Demokrasi Rakyat PKI (FDR/PKI) mewujudkan cita-citanya mendirikan negara komunis. Namun aksi ini dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia.⁴⁷

Pada pasca kemerdekaan inilah terjadi perubahan dalam pasukan Mangkunegaran dimana *Worontono* berubah menjadi laskar pura bernama *Rumeksopuro* yang khusus bertugas menjaga keamanan lingkungan praja Mangkunegaran dari bahaya musuh. Lembaga keamanan *Rumeksopuro* ini dibentuk oleh pemerintahan Mangkunegaran dengan mengeluarkan surat

⁴⁶ Cahyo Budi Utomo, *op.cit.*, halaman 222.

⁴⁷ Samsudin, 2005, *Mengapa G 30 S/PKI Gagal?* (Suatu Analisa), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 12.

Pepatihdalem No. 6112/12 tanggal 30 November 1945 sedangkan tatanan *Rumeksopuro* sendiri telah terbentuk sejak tanggal 5 Desember 1945. Istilah *Rumeksopuro* sendiri terbagi atas dua kata yakni kata *Rekso* atau *Rumekso* yang berarti menjaga dan kata *puro* yang berarti istana. Jadi *Rumeksopuro* itu adalah suatu lembaga yang bertugas menjaga keamanan istana. Dalam menjalankan tugasnya, *Rumeksopuro* ini berada dibawah tanggungjawab kabupaten *Mandrapura*.⁴⁸ kabupaten mandrapura ini merupakan salah satu bagian birokrasi Mangkunegaran yang bertanggungjawab menangani segala hal mengenai kondisi istana termasuk bertanggungjawab dalam hal keamanan istana.

Dengan melihat kekuatan musuh yang lebih besar dan lebih kuat baik dari segi jumlah pasukan maupun persenjataannya, maka pembentukan badan keamanan ini dilakukan secara lebih terorganisir meliputi sistem penjagaannya dan struktur kepegawaiannya. Selain itu dilengkapi persenjataan yang cukup modern meskipun dalam segi persenjataan masih kalah dibanding dengan pihak musuh. Persenjataan yang dimiliki merupakan persenjataan milik *legiun Mangkunegaran*, salah satu subsidi dari pemerintah Belanda pada jaman dulu.⁴⁹

Istana merupakan pusat pemerintahan kerajaan yang mana mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya dan sebagai tempat menjalankan roda pemerintahan. Dengan begitu memperlihatkan bahwa kedudukan istana Mangkunegaran sangatlah penting sehingga perlu diadakan penjagaan oleh *Rumeksopuro* guna mengantisipasi hal-hal yang mengancam

⁴⁸ Arsip Mangkunegaran VIII No 3459, Surakarta:Rekso Pustoko.

⁴⁹ Sarwanto Wiryosaputro,*op.cit.*,halaman 48.

keberadaan kekuasaan Praja Mangkunegaran terutama yang berhubungan erat dengan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Penjagaan Pura Mangkunegaran di masa revolusi ini sangatlah ketat sehingga tidak sembarang orang bisa masuk hanya orang-orang tertentu dan yang berkepentingan saja yang bisa masuk kedalam Pura Mangkunegaran ini. Ini bukan berarti para pejabat kerajaan bisa seenaknya keluar masuk istana Mangkunegaran. Untuk memasuki lingkungan istana Mangkunegaran apalagi pada saat kondisi keamanan sekitarnya tidak aman, tidak sembarang orang bisa masuk istana bahkan seorang pembesar Mangkunegaranpun harus membawa surat ijin masuk istana yang telah ditanda tangani oleh pihak pemerintah Mangkunegaran dan surat ijin itu hanya digunakan dalam rangka menjalankan tugasnya terutama pada waktu malam hari disaat ada perintah yang bersifat mendadak. Dan pada saat genting semua pintu gerbang Pura Mangkunegaran ditutup dan dijaga ketat oleh penjaga keamanan *Rumeksopuro* (pada masa pendudukan Jepang, prajurit *Gyuu Tai* Mangkunegaran dikerahkan untuk menjaga istana Mangkunegaran).⁵⁰

Praja Mangkunegaran juga meminta bantuan dari pihak Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan kota Surakarta dengan mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan surat ini terdapat pembagian tugas penjaga keamanan yakni untuk wilayah kota Surakarta diserahkan kepada pihak ketentaraan RI sedang untuk lingkungan dalam Pura Mangkunegaran sendiri

⁵⁰ Gyuu Tai adalah Badan Gerakan Pengawas Taruna, badan ini pernah bertugas sebagai pengaman praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan Jepang.

menjadi tanggungjawab *Rumeksopuro*.⁵¹ Jadi dengan surat tersebut pihak pemerintah Mangkunegaran

B. Latarbelakang Berdirinya *Rumeksopuro* di Praja Mangkunegaran.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia begitu cepat menyebar keseluruh Indonesia dan kabar gembira itu disambut baik oleh rakyat di seluruh penjuru tanah air dengan munculnya pernyataan beberapa kekuasaan di daerah yang menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah Mangkunegaran dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mangkunegaran VIII melalui maklumat No. 1 tanggal 1 September 1945. Maklumat ini menyatakan bahwa pemerintahan Mangkunegaran mengakui dan menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

Pada masa revolusi seluruh daerah di Indonesia termasuk Surakarta diwarnai dengan suasana peperangan yang tiada henti-hentinya. Masalah keamanan di setiap daerah di seluruh Indonesia ini diserahkan kepada pemerintah setempat. Karena wilayah Surakarta merupakan bagian dari wilayah pemerintah Indonesia, maka masalah keamanan ini menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah resmi Surakarta yang tak lain adalah pemerintah Kasunanan dan pemerintah Mangkunegaran. Apalagi pada pertengahan bulan Oktober 1945

⁵¹ *Surat Mangkunegaran Kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 25 Jni 1946*, Koleksi Kearsipan Mangkunegaran VIII No 3465, Surakarta: Rekso Pustoko.

⁵² *Keterangan Ringkas Mengenai Keadaan Praja Mangkunegara Pada Masa Sebelum dan Sesudah Revolusi Kemerdekaan*. Arsip Mangkunegara VIII No 1053, Surakarta: Rekso Pustoko.

Presiden Sukarno menjadikan Surakarta sebagai daerah istimewa dengan Sri Mangkunegara VIII bertindak sebagai kepala daerah. Dengan ini Mangkunegaran dibebani tanggung jawab yang besar dalam rangka menjaga keamanan wilayah Surakarta dari datangnya bahaya musuh.⁵³

Berdasarkan amanat proklamasi kemerdekaan RI dan maklumat dari pemerintah pusat mengenai tanggungjawab keamanan di wilayah kekuasaannya masing-masing, maka pemerintah Mangkunegaran membentuk sebuah badan keamanan guna menjaga kelancaran roda pemerintahan di Surakarta. Roda pemerintahan di daerah sebenarnya merupakan faktor pendukung tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti apa yang tertulis dalam UU RI pasal 18 yang menyatakan bahwa daerah istimewa berkedudukan sebagai penyokong tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaannya diatur dengan praturan perundang-undangan yang ada. Disamping itu juga negara Indonesia itu merupakan suatu negara yang berbentuk kesatuan sehingga tidak mungkin daerah-daerah yang dimiliki negara kesatuan itu berbentuk negara juga hanya saja beberapa daerah itu diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (hak otonomi atau *zelftandig*) tanpa terlepas dari peraturan dari pemerintah pusat atau bersifat tidak merdeka (*anafhankelijk*).⁵⁴ Oleh karena itu hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangatlah erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 183.

Surakarta juga merupakan salah satu pusat pergerakan kebangsaan Indonesia yang berhasil melahirkan para tokoh pergerakan nasional selain Jakarta sehingga tidak mengherankan jika dalam perjalanan sejarahnya kota ini dijadikan barometer perkembangan politik. Suasana politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat labil ditambah dengan ancaman dari pihak pemerintah asing menjadikan negara kesatuan ini selalu bergejolak. Suasana mencekam juga terjadi di daerah-daerah termasuk Surakarta. Kondisi ini membuat para pembesar Praja Mangkunegaran menjadi cemas akan keamanan di wilayah kekuasaan Mangkunegaran terutama dalam lingkungan istana Mangkunegaran.

Oleh karena itu para pembesar Praja Mangkunegaran melakukan musyawarah pada tanggal 23 November 1945 guna membahas masalah keamanan Mangkunegaran demi menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman musuh baik dari dalam maupun luar.⁵⁵ Dari musyawarah itu diperoleh suatu keputusan dengan dikeluarkannya surat resmi dari Papatihdalem No 6112/12 pada tanggal 30 November 1945 yang berisi perincian mengenai tugas dan kewajiban dari masing-masing kabupaten di Praja Mangkunegaran serta pembentukan secara resmi laskar pura yang diberi nama *Rumeksopuro*.⁵⁶

C. Keanggotaan *Rumeksopuro* dan Kesejahteraannya.

⁵⁵ *Cacatan Pendek Rapat Para Pembesar dalam Astana Mangkunegaran Pada Tanggal 23 November 1945*. Arsip Mangkunegaran VIII No 3507, Surakarta:Rekso Pustoko.

⁵⁶ *Surat Keputusan dari Papatihdalem Praja Mangkunegaran No 6112/12 Pada Tanggal 30 November 1945*. Arsip Mangkunegaran VIII No 3459, Surakarta:Rekso Pustoko.

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaannya.

Suatu organisasi dapat menjalankan tugas dengan lancar dan terarah serta dengan mudah mewujudkan tujuan jika dalam organisasi terdapat struktur kepegawaian yang dilengkapi dengan pembagian tugas dan kewajiban yang jelas. Organisasi keamanan *Rumeksopuro* ini juga terdapat pembagian tugas yang jelas dengan membentuk susunan kepengurusan dan pada tahun 1948 susunan kepengurusan *Rumeksopuro* dan dilengkapi rincian gaji adalah:

1. Pemimpin Umum. Jabatan ini dipegang oleh R.M. Soewanto dan mendapat gaji sebesar Rp 65,-.
2. Kepala Staff. Jabatan ini dipegang oleh Djagasoetardjo dan mendapat gaji sebesar Rp 40,-.
3. Wakil Kepala Staff. Jabatan ini dipegang oleh R.M. Sidiman dan mendapat gaji sebesar Rp 35,-.
4. Pembantu Staff. Jabatan ini dipegang oleh R.M. Santoso dan mendapat gaji sebesar Rp 25,-.
5. Kepala Administrasi. Jabatan ini dipegang oleh Soetardjo Poespaja dan dibantu oleh para pegawai kantor *Natapraja* dan mendapat gaji sebesar Rp 42,50,-.

Para pegawai diatas tadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempati bekas kantor *Kandisono*, yang terletak di barat pintu gerbang utama dan sekarang menjadi kantor untuk pariwisata⁵⁷

⁵⁷ Arsip Mangkunegaran VIII No 3474, Surakarta: Rekso Pustoko.

Dalam susunan barisan *Rumeksopuro* itu dibagi menjadi 4 bagian yang bertanggungjawab kepada seorang pemimpin umum. Bagian-bagian itu adalah sebagai berikut:

1. Penjagaan.

Pada bagian penjagaan ini terdiri dari:

Pemimpin umum	:	1	orang
Pemimpin barisan	:	1	orang
Pemimpin pasukan	:	2	orang
Pemimpin brigade	:	4	orang
Wakil pemimpin brigade	:	4	orang
Serdadu	:	92	orang
<hr/>			
Jumlah	:	104	orang

1 barisan terdiri dari 102 orang dibagi menjadi 2 pasukan. Tiap1 pasukan terdiri dari 51 orang dengan pemimpin pasukannya dan 1 pasukan itu dibagi menjadi 2 brigade dimana tiap brigade terdiri dari 25 orang dengan komandannya.

Istilah bagi penjaga di bagian pintu gerang muka adalah jaga kehormatan sedang untuk bagian pintu lainnya diberi istilah pejaga pintu bagian barat dan timur. Diantara penjaga ditunjuk 1 atau 2 orang yang bertugas menerima tamu atau menerima orang yang mempunyai keperluan dengan kepala jaga. Orang tersebut diatas diambilkan dari orang yang hendak mengganti jaga, berganti menurut perintah atau tunjukan dari kepala jaga (*Hikaihei*) dan penjaga yang lain bertugas meronda (*Dosjo*).

Penjagaan dilakukan setiap sore mulai jam 17.00 dan pergantian penjaga dilakukan pada jam 17.00 sore juga jadi tiap penjagaan dilakukan selama 24 jam. Pergantian jaga juga dapat dilakukan pada pagi hari jam 10.00. Ini dilakukan pada musim hujan. setiap naik jaga dilakukan oleh 20 orang beserta komandannya dengan 5 orang cadangan guna mengantisipasi bila ada penjaga yang sakit. Jadi setiap penjagaan dilakukan oleh 1 brigade. Selain menjalankan tugas jaga sebanyak 2 kali dalam seminggu yakni senin dan kamis mereka juga menerima perintah-perintah dari atasan serta mempelajari cara baris-berbaris dan membersihkan senjata. Para penjaga dibagi dalam beberapa pos jaga yaitu di rumah jaga *Pamedan*. Pos jaga ini diantaranya terletak:

a) Pintu muka	: 3 orang
b) Pintu barat	: 3 orang
c) Pintu timur	: 3 orang
d) Ujung puri	: 2 orang
e) Asrama	: 2 orang
f) Kepatihan	: 5 orang
g) Komandan jaga	: 1 orang
h) Pengantar	: 1 orang
i) Cadangan	: 5 orang
<hr/>	
Jumlah	: 25 orang atau 1 brigade

Pengumpulan anggota jaga yang ada di kampung-kampung dengan menggunakan wekker di kampung masing-masing. Apabila serangan atau bahaya

muncul secara tiba-tiba, maka dengan segera para anggota jaga masuk ke istana tanpa menunggu perintah dari para pembesar Mangkunegaran.

2. Tata usaha.

Pada bagian tata usaha terdiri dari:

Pemimpin	:	1	orang
Pembantu	:	1	orang
Pesuruh	:	1	orang
<hr/>			
Jumlah	:	3	orang

Bidang tata usaha mempunyai tugas yaitu mengurus keperluan anggota Badan Penjaga Astana (BPA) mengenai pakaian, makanan, keluar masuknya uang dan surat-surat dan memperbaiki serta mengurus alat musik dan lain-lain yang berhubungan dengan BPA.

3. Musik.

Pada bagian musik terdiri dari:

Pemimpin	:	1	orang
Wakil pemimpin	:	1	orang
Pemain	:	20	orang
<hr/>			
Jumlah	:	22	orang

Pada permulaan tahun 1947 leh pihak pemimpin Natapraja, bagian musik ini diperintahkan untuk masuk kerja hanya pada hari senin, rabu dan sabtu serta

pada saat ada acara penting lainnya seperti upacara-upacara tradisional atau perayaan lainnya.⁵⁸

4. Dapur dan tukang kebun.

Pada bagian dapur dan tukang kebun terdiri dari:

Pemimpin	:	1	orang
Pemasak	:	3	orang
Tukang kebun	:	2	orang
<hr/>			
Jumlah	:	6	orang

Bagian dapur bertugas memasak makanan bagi para anggota jaga sedangkan tukang kebun bertugas membersihkan dan merawat taman.⁵⁹

Pada masa revolusi keanggotaan *Rumeksopuro* mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan banyak anggota yang mengundurkan diri dan meleburkan diri ke laskar-laskar pejuang lainnya untuk melanjutkan cita-citanya. Adapun susunan keanggotaan *Rumeksopuro* menjadi:

1. Bagian penjagaan.

Pada bagian penjagaan ini terdiri dari:

Pemimpin umum	:	1	orang.
Pembantu pemimpin	:	1	orang.
Pemimpin pasukan	:	2	orang.
Pemimpin penjagaan	:	4	orang.
Serdadu	:	60	orang.
<hr/>			
Jumlah	:	68	orang.

⁵⁸ Surat Natapraja tertanggal 1 Maret 1947, Arsip Mangkunegara VIII No 3512, Surakarta: Rekso Pustoko.

⁵⁹ Arsip Mangkunegaran VIII No 3467, Surakarta: Rekso Pustoko.

Tugas penjagaan istana dilakukan oleh 64 orang. Jumlah ini dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing regu berjumlah 15 orang beserta pemimpinnya. Setiap hari berjaga selama 24 jam dan setiap hari semua anggota masuk (selama 7 hari) untuk melakukan latihan selama 2 jam dari jam 08.00 sampai dengan 10.00. latihan-latihan itu berupa gerakan dan aba-aba yang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dalam memenuhi keperluan sehari-hari dimana anggota *Rumeksopuro* tidak lagi menempati asrama, maka pihak pemerintah menanggung keperluan makan selama mereka menjalankan tugas yakni sebanyak 3 kali sehari .

Tempat penjagaan berada di *Hoofwacht* sedang tempat-tempat yang dijaga adalah sebagai berikut:

a) Pintu muka	:	3	orang.
b) Pintu timur	:	3	orang.
c) Pintu barat	:	3	orang.
d) Ujung puri	:	3	orang.
e) Asrama	:	2	orang.
Kepala jaga	:	1	orang.
Pengantar	:	1	orang.
Jumlah	:	16	orang.

2. Bagian tata usaha.

Pada bagian tata usaha terdiri dari:

Pemimpin	:	1	orang.
Pembantu	:	1	orang.

Pesuruh : 1 orang.

Jumlah : 3 orang.

3. Bagian dapur.

Pada bagian ini terdiri dari:

Pemasak : 4 orang.

Jadi semua anggota Rumeksopuro berjumlah 75 orang. Para anggota *Rumeksopuro* mendapat seragam diantaranya: 1 stel pakaian dengan peci, 1 *paar putties*, dan 1 *handsdoek*. Sebelum masuk menjadi anggota *Rumeksopuro* terlebih dahulu mereka menandatangani surat kontrak untuk bertugas selama 1 tahun dan dapat kontrak dapat diperpanjang. Seandainya seseorang ingin berhenti padahal masa kontrak belum selesai maka orang itu dapat mengajukan surat pengunduran diri.⁶⁰

Tugas dan kewajiban dalam menjaga keamanan lingkungan Istana Mangkunegaran sebenarnya diserahkan kepada seluruh *abdidalem* karena masalah keamanan disetiap kantor menjadi tanggungjawab para pembesar dari kantor masing-masing. Ini berarti hanya orang-orang dalam saja yang bertanggungjawab penuh menjaga keamanan istana Mangkunegaran dan tidak heran apabila para anggotanya mempunyai status sebagai *abdidalem* istana Mangkunegaran

2. Kesejahteraan Anggota *Rumeksopuro*.

Dalam sistem kepegawaian masalah penggajian merupakan salah satu hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut kehidupan pegawainya. Kebutuhan manusia itu amatlah banyak dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Oleh

⁶⁰ *Ibid.*

karena dalam rangka memenuhi kebutuhan itu manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Gaji atau upah adalah imbalan yang diberikan apabila seseorang telah melakukan pekerjaan untuk orang lain. Istilah gaji dapat dibedakan berdasarkan segi penggunaannya. Istilah gaji biasanya digunakan dilingkungan perusahaan negara sedangkan istilah upah lebih dikenal dilingkungan perusahaan swasta.⁶¹

Dasar pemberian gaji dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu keadaan keuangan perusahaan, tinggi pasaran gaji, tingginya biaya hidup, perjanjian kerja bagi perusahaan swasta dan peraturan pemerintahan bagi pegawai negara.⁶² Gaji untuk para *abdidalem* pada dasarnya merupakan sebuah tunjangan. Dan masalah tunjangan para *abdidalem* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tunjangan untuk pegawai yang hanya berstatus pegawai dan tunjangan bagi para *putra sentana*.⁶³ Tunjangan bagi pegawai biasa biasanya didasarkan atas pengabdian sedang untuk tunjangan bagi para *putra sentana* biasanya didasarkan atas adanya hubungan pribadi (hubungan darah) dengan Mangkunegara. Gaji para *abdidalem* secara nominal sangatlah kecil dibandingkan dengan gaji para pegawai instansi pemerintah yang setingkat. Pada masa Mangkunegara VIII ini dimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik berada pada masa transisi dari masa kolonial

⁶¹ Slamet Saksono, 1989, *Administrasi Kepegawaian*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, halaman 37.

⁶² *Ibid*, halaman 140.

⁶³ Budi Daryanto, 1995, *Struktur Organisasi dan Sistem Manajemen Kepegawaian Praja Mangkunegara Pada Masa Mangkunegara VIII*, Surakarta: Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, halaman 95.

ke masa republik serta adanya pembekuan daerah swapraja yang turut berpengaruh pada kekayaan praja.⁶⁴

Gaji bagi para *abdidalem* bukan merupakan tujuan pokok karena mereka bekerja hanya untuk mendapatkan rahmat dari leluhur untuk keperluan rohani.⁶⁵ Dan masa pengabdian para *abdidalem* ini tidak terbatas yang berarti tidak mengenal masa pensiun. Seandainya seorang *abdidalem* sudah merasa tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya karena alasan tertentu maka dapat mengajukan surat permohonan untuk mengundurkan diri.⁶⁶

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dikeluarkanlah maklumat Mangkunegara tanggal No 1 tanggal 1 September 1945 yang menjelaskan status kedudukan kepegawaian *abdidalem* dalam tatanan RI. Dengan maklumat ini menjadikan para pegawai Mangkunegaran termasuk pegawai *Rumeksopuro* tidak hanya sebagai *abdidalem* praja Mangkunegaran tetapi juga menjadi bagian dari pegawai pemerintah Republik Indonesia. Dalam segi kesejahteraan pegawai, para anggota *Rumeksopuro* ini juga mendapat gaji dan tunjangan.⁶⁷

Pemberian gaji kepada para anggota *Rumeksopuro* ini didasarkan atas tingkat kedudukan atau jabatan. Sistem ini juga berlaku dalam hal pemberian tunjangan. Selain tunjangan, bagian jawatan *Notoprojo* juga membagikan bahan makanan kepada tiap-tiap anggota laskar berupa beras sebanyak 1 liter dan garam

⁶⁴ *Ibid*,halaman 96.

⁶⁵ De Jong,1976,*Salah Satu Sikap Orang Jawa*,Semarang:Yayasan Kanisius,halaman 140.

⁶⁶ Budi Daryanto,*op.cit.*,halaman 97.

⁶⁷ Arsip Mangkunegara VIII No.3508, Surakarta:Rekso Pustoko.

sebanyak $\frac{1}{4}$ liter.⁶⁸ Dengan pemberian bahan makanan ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan anggota Rumeksopuro apalagi ketika kondisi ekonomi pada masa revolusi sangatlah menurun karena terjadi inflasi sebagai dampak dari politik belanda yang ingin menghancurkan Indonesia.

Tabel 1. Daftar gaji pegawai *Rumeksopuro* tahun 1946.⁶⁹

Barisan	Gaji	Banyak anggota	Jumlah
Pemimpin Umum	f 65	1	f 65
Pembantu Pemimpin Umum	f 35	1	f 35
Pemimpin Pasukan	f 19	2	f 38
Kepala Rombongan	f 65	4	f 260
Wakil Kepala Rombongan	f 55	4	f 220
Laskar	f 50	92	f 4600
Kantor			
Tata Usaha	f 22	1	f 22
Pembantu	f 15	1	f 15
Suruhan	f 10	1	f 10
Kepala Dapur	f 13	1	f 13
Koki	f 10	3	f 30
Tukang Kebun	f 10	2	f 20
Musik			
Pemimpin	f 42,5	1	f 42,5
Wakil Pemimpin	f 22	1	f 22
Pemain Kelas I	f 17	1	f 17
Pemain Kelas II	f 15	6	f 90
Pemain Kelas III	f 10	16	f 160
Jumlah			f 5659,5

Sumber: Arsip Mangkunegara VIII No 3503, Surakarta: Reksopustoko.

Tabel 1 merupakan rincian gaji para anggota Rumeksopuro pada awal berdirinya. Dari rincian itu dengan jelas dapat diketahui perbedaan tingkat gaji

⁶⁸ Surat Kepala Jawatan Notoprojo No 121/I/B tanggal 5 Maret 1947 mengenai pembagian baha makanan, Arsip Mangkunegara No VIII No 3506, Reksopustoko, Surakarta.

⁶⁹ Arsip Mangkunegara VIII No 3503, Reksopustoko, Surakarta. Dan symbol *f* adalah simbol rupiah pada masa pendudukan Jepang. Ini dikarernakan Jepang mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan bentuk pemerintahan didaerah jajahannya yang lepas dari bentuk pemerintahan colonial barat

dari masing-masing anggota berdasarkan kedudukannya dalam organisasi tersebut. Dengan pemberian gaji serta ditambah dengan beberapa bahan makanan seperti beras dan garam maka diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pokok anggotanya.

Tabel 2. Daftar gaji dan tunjangan para pegawai *Rumeksopuro* pada Maret 1947 dalam rupiah.⁷⁰

No	Nama	Gaji pokok	Tunjangan (¼dari gaji pokok)
	Bagian pegawai		
1	R.M.Disoeparto	57,50	14,38
2	Soetardjo	30	7,50
3	Soeparmin	19	4,75
4	Srisoejati	30	7,50
5	Soemardi	30	7,50
	Jumlah	166,50	41,63
	Bagian musik		
1	Reksolasmanto	50	12,50
2	Tw.Soekardjo	30	7,50
3	Soeratmo	22	5,50
4	Citrosoepardjo	19	4,75
5	Redjono	19	4,75
6	Soerodijo	19	4,75
7	Soekardjo	19	4,75
8	Rochnadi	19	4,75
9	Soedijono	19	4,75
10	Soedjkaridjo	19	4,75
11	Karjosemito	19	4,75
12	Paiman	19	4,75
13	Soewandi	12	3
14	Kasman	12	3
15	Djogokarsono	12	3
16	Sastrowaloejo	12	3
17	Djogosoejijto	12	3
18	Karjosoemarto	12	3
19	Soedarsono	12	3

⁷⁰ Arsip Mangkunegara VIII No 3508 mengenai laporan gaji dan tunjangan pegawai Reksopuro dari tata usaha No 481/P, Surakarta:Reksopustoko.

	Jumlah	357	89,25
	Bagian dapur		
1	Sidi	20	5
2	Sodikromo	20	5
	Jumlah	40	10
	Bagian Rumeksopuro		
1	Djogosoetardjo	36	9
2	Troenawargoto	36	9
3	Soediman	36	9
4	Djogotenojo	36	9
5	Sariman	33	8,25
6	Soetardjo	33	8,25
7	Sarimin	33	8,25
8	Troenosoebardjo	33	8,25
9	Troenwigoena	30	7,50
10	Pr.Soemarto	30	7,50
11	Tirtoboedjono	30	7,50
12	Somahirmanto	30	7,50
13	Tanoe	30	7,50
14	Wagimin	30	7,50
15	Tjokrohoetomo	30	7,50
16	Soeromoermanto	30	7,50
17	Hardjotaroeno	30	7,50
18	Troenotenojo	30	7,50
19	Djogoredjono	30	7,50
20	Atmosantiko	30	7,50
21	Kirman	30	7,50
22	Kartoredjono	30	7,50
23	Soegijo	30	7,50
24	Kapijo	30	7,50
25	Kasilo	30	7,50
26	Sakimin	30	7,50
27	Soepardjo	30	7,50
28	Soetijgartono	30	7,50
29	Toekidjo	30	7,50
30	Slamet.A	30	7,50
31	Djiman	30	7,50
32	Koesman	30	7,50
33	Kardi	30	7,50
34	Ngadimin	30	7,50
35	Saidi	30	7,50
36	Djogosoenggoto	30	7,50
37	Sarido	30	7,50
38	Pr.Toendoko	30	7,50
39	Wirjisardjono	30	7,50
40	Soekarjomo	30	7,50
41	Lasiman	30	7,50

42	Soerotijono	30	7,50
43	Kijato	30	7,50
44	Wiromarwono	30	7,50
45	Sido	30	7,50
46	Tojiman	30	7,50
47	Hardjiprajitno	30	7,50
48	Soetarso	30	7,50
49	Somapawiro	30	7,50
50	Soerotoekijo	30	7,50
51	Darso	30	7,50
52	Troenomintono	30	7,50
53	Djojosemito	30	7,50
54	Soelandjani	30	7,50
55	Prawirosoewongso	30	7,50
56	Pr.Dimedjo	30	7,50
57	Soerotenojo	30	7,50
58	Atmomitrojo	30	7,50
59	Somoprawiro	30	7,50
60	Pr.Soewongso	30	7,50
61	Pawirodimedjo	30	7,50
62	Soerotenojo	30	7,50
63	Atmomitrojo	30	7,50
64	Martohardjono	30	7,50
65	Ronowidjojo	30	7,50
66	Partodijono	30	7,50
67	Ngadijo	30	7,50
68	Pr.Semito	30	7,50
69	Djogodikarjo	30	7,50
70	Samino	30	7,50
71	Kadar	30	7,50
72	Hoepomo	30	7,50
73	Soetamin	30	7,50
74	Soerotenojo	30	7,50
75	Soerowirjoto	30	7,50
76	Soerotijono	30	7,50
77	Hardjopranowo	30	7,50
78	Djogokarjoto	30	7,50
79	Sandimin	30	7,50
80	Toekiman	30	7,50
81	Darmono	30	7,50
82	Rebo	30	7,50
83	Slamet.B	30	7,50
84	Pr.Loemekso	30	7,50
85	Soeradjo	30	7,50
86	Somowidjojo	30	7,50
87	Mardjono	30	7,50
88	Somosoeakasno	30	7,50
89	Wirohardjono	30	7,50

90	Troensoedarso	30	7,50
91	Troenobratono	30	7,50
92	Atmowirjono	30	7,50
93	Soekardjo	30	7,50
94	Pr.Prasodo	30	7,50
95	Soekardi	30	7,50
96	Soeparman	30	7,50
97	Djogodikardjo	30	7,50
98	Troenoatmodjo	30	7,50
Jumlah		2976	744

Sumber : Arsip Mangkunegara VIII No 3508, Surakarta: Rekso Pustoko.

Dari tabel 2 memperlihatkan perubahan jumlah tunjangan yang diterima para pegawai *Rumeksopuro*. Tunjangan yang diberikan kepada anggotanya pun sebesar $\frac{1}{4}$ gaji pokok masing-masing.⁷¹ Selain itu juga pada awal tahun 1948 pemerintah Mangkunegaran mengganti jatah makanan bagi *Rumeksopuro* dengan uang.⁷² Jadi penghapusan jatah makan ini tidak mengurangi kesejahteraan anggota karena diganti dengan uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan makan orang setiap harinya.

Tabel 3. Rincian tunjangan Rumeksopuro dari pemerintah pusat perbulan sebesar

Rp 500,-.⁷³

No	Stb. No.	Nama	Jumlah
	Bagian Staff.		
1	6401	Djigisoetarjo	15
2	6403	R.M.Sidiman	15
3	6432	R.M.Santosa	15
	Bagian Barisan		
1	6447	Soelandjani	15
2	6485	Sardjoe	15
3	6445	Troenomadijono	15
4	6409	Tanoe	15

⁷¹ Laporan dari Tata Usaha Rumeksopuro No 481/P tanggal 11 Februari 1947 Mengenai daftar gaji. Arsip Mangkunegara VIII No 3508, Reksopustoko Surakarta.

⁷² Arsip Mangkunegaran VIII No 3510, Reksopustoko, Surakarta.

⁷³ Arsip Mangkunegara VIII No 3508, Reksopustoko, Surakarta.

5	6412	Soeromoerwanto	15
6	6414	Troenotenojo	15
7	6415	Djogoredjono	15
8	6419	Keman	15
9	6420	Soegijo	15
10	6421	Kapijo	15
11	6481	Soepardjo	15
12	6480	Renggomoelyanto	15
13	6428	Djojosoenggoto	15
14	6433	Soerokarmojo	15
15	6437	Kijatto	15
16	6438	Wiromarwono	15
17	6487	Troensoewondo	15
18	6488	Somopitono	15
19	6489	Soekamto	15
20	6490	Darso	15
21	6467	Soerosadjijo	15
22	6444	Tirtoboedjono	15
23	6453	Somopawiro	15
24	6454	Partidijono	15
25	6458	Samijo	15
26	6461	Kadar	15
27	6494	Soerowirjoto	15
28	6462	Prawirotijoto	15
29	6466	Toekiman	15
30	6446	Sombito	15
31	6472	Somowidjojo	15
32	6473	Marijan	15
33	6486	Soekardjo	15
34	6498	Soeseto	15
35	6476	Troensoedarso	15
Jumlah			570

Sumber : Arsip Mangkunegara VIII No 3508.

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa terdapat selisih uang antara jumlah tunjangan yang diberikan pemerintah dengan jumlah tunjangan yang dibutuhkan yakni sebesar Rp 70,-. Dan kekurangan yang dialami terpaksa ditutup dengan dana pribadi yang dikeluarkan oleh Sri Paduka Mangkunegara sendiri. Sehingga dana yang diterima Rumeksopuro sebagian besar berasal dari dana praja Mangkunegaran.

Tabel 4. Daftar rencana gaji dan tunjangan para pegawai *Rumeksopuro* bulan November 1950.dalam rupiah.⁷⁴

No	Pangkat	Jumlah Pegawai	Gaji perbulan	Tunjangan keluarga
1	Pemimpi umum	1	155	23,25
2	Wakil pemimpin umum	1	110	16,50
3	Juru ketik	1	38	
4	Pesuruh	1	30	1,50
5	Kepala staff	1	80	4
6	Wakil kepala staff	1	70	7
7	Pembantu staff	1	50	2,50
8	Kepala regu I	1	50	5
9	Kepala regu II	1	50	10
10	Wakil kepala regu I	1	45	4,50
11	Wakil kepala regu II	1	45	11,25
12	Laskar I	1	40	10
13	Laskar II	4	40	8
14	Laskar III	31	40	6
15	Laskar IV	3	40	4
16	Laskar V	5	40	2
Jumlah		55	2483	335,50

Sumber : Arsip Mangkunegara VIII No 3501.

Pada tabel 4 diatas memperlihatkan daftar rencana gaji dan tunjangan para pegawai *Rumeksopuro* pada tahun 1950 kembali mengalami perubahan. Perubahan besar gaji dan tunjangan ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara saat itu yang sedang mengalami revolusi guna menjamin kesejahteraan anggota *Rumeksopuro* dan keluarga serta seluruh *adidalem* Mangkunegaran pada umumnya.

D. Fasilitas Asrama Dalam *Rumeksopuro*.

Asrama yang disediakan oleh *Rumeksopuro* tidak hanya diperuntukkan bagi para *putra sentono* dan *Narapraja* yang merasa dirinya dalam keadaan

⁷⁴ Arsip Mangkunegaran VIII No 3501, Reksopustoko, Surakarta.

terancam tapi juga untuk tempat berlindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada Praja Mangkunegaran. Perlindungan ini hanya diberikan pada waktu malam saja. Dalam penggunaan fasilitas asrama ini pihak *Rumeksopuro* juga menciptakan peraturan bagi para penghuni sehingga dapat tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam asrama. Adapun peraturan dalam asrama *Rumeksopuro* antara lain:

1. Asrama *Rumeksopuro* beserta halamannya menjadi tanggung jawab pemerintah Mangkunegaran.
2. Pemakaian ruangan dan halaman asrama harus seizin pemerintah Mangkunegaran.
3. Pimpinan dan pengawasan asrama seluruhnya untuk sementara waktu diserahkan kepada *Rumeksopuro*.
4. Untuk sementara asrama disediakan untuk tempat perlindungan bagi:
 - a) *Sentana dalem* dan *narapraja* yang merasa dirinya sedang terancam. Perlindungan ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri tanpa membawa keluarga dan orang lainnya.
 - b) Orang-orang lain yang mohon perlindungan di asrama dan selama dalam asrama semua keperluan ditanggung oleh pamongpraja atau jawatan dari orang yang mengungsi tersebut.
 - c) Pada pokoknya perlindungan hanya diberikan diwaktu malam.
5. Bagi penghuni asrama harus mentaati peraturan dari *Rumeksopuro* dan bersama-sama memelihara tata tertib dalam lingkungan asrama.

6. Bagi para penghuni harus saling tolong menolong dan menjaga terlaksananya tata tertib tersebut.
7. Bagi penghuni asrama harus bersama-sama memelihara kebersihan tempat dan kesehatannya.
8. Peraturan lain yang bertujuan untuk menjaga keselamatan lingkungan asrama dan astana juga harus dijalankan oleh penghuni asrama.⁷⁵

Disaat kota Surakarta berubah menjadi sangat mencekam dan banyak orang merasa terancam maka pihak pemerintah Mangkunegaran menyediakan tempat pengungsian. Tempat pengungsian ini diagi menjadi 3 antara lain:

- a. Lingkungan istana Mangkunegaran, tempat ini dianggap sebagai sektor A.
- b. Lingkungan *Prangwadana* dan sekitarnya, tempat ini dianggap sebagai sektor B.
- c. Sekolah Menengah II, tempat ini dianggap sebagai sektor C.

Disektor A digunakan sebagai tempat utama dalam mengatur dan bertanggungjawab penuh kepada pemerintah Mangkunegaran atas segala urusan yang berhubungan dengan masalah pengungsian sedang yang bertugas menerima dan mengatur para pengungsi diarahkan kepada para pegawai *kabupaten Hamongpraja* dan *Kartausaha* yang berkantor di sebelah selatan regol kantor *kabupaten Martapraja* dan *Wanamarta*. Para pegawai tersebut ditunjuk oleh para pembesar kabupaten masing-masing. Pertanggungjawaban dari sektor C

⁷⁵ *Peraturan Dari Papatihdalem Mangkunegaran Pada Tanggal 25 Maret 1949 Mengenai Peraturan Asrama Rumeksopuro Cavaleri Mangkunegaran, Arsip Mangkunegara VIII No 3501, Surakarta:Rekso Pustoko.*

diserahkan kepada *kabupaten Barajawijata* serta sektor B berada dibawah tanggungjawab *kabupaten Kartiraharjo*.

Bagian dapur pengungsi juga dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sektornya masing-masing, yaitu: untuk sektor A diserahkan kepada *Reksabaksana*, sektor B diserahkan kepada *Pawon puro* dan sektor C diserahkan kepada *Rumeksopuro*. Masalah persediaan makanan diserahkan kepada *kabupaten Kartiraharjo* yang harus menyediakan bahan makanan untuk ± 1000 orang selama 5 hari.

Bagian *Rumeksopuro* yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah pengungsi, antara lain:

1. Bagian tempat.

Bagian tempat ini bertugas menyediakan tempat bagi para pengungsi dan mengurus segala macam yang berhubungan dengan tempat pengungsian (asrama).

2. Bagian dapur.

Bagian dapur bertugas mengurus makanan bagi para pengungsi termasuk dalam hal menyediakan bahan makanan, memasak dan membagikan makanan.

3. Bagian keamanan.

Bagian ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban disekitar tempat pengungsian.

4. Bagian kesehatan.

Bagian kesehatan ini bertugas menangani masalah kesehatan para pengungsi dan yang bertanggungjawab atas masalah ini diserahkan kepada pihak *Yatnanirmala*.

5. Bagian umum.

Bagian ini bertugas membantu bagian lain agar berjalan dengan lancar seperti dalam hal surat-menyurat, laporan-laporan dan lain-lain.⁷⁶

Bagian-bagian ini saling bekerjasama dengan baik dan sangat dibutuhkan terutama pada saat yang darurat karena dengan adanya bagian-bagian ini para pengungsi tidak akan merasa sulit dalam memenuhi kebutuhan primer yakni pangan selain itu juga kesehatan dan lain sebagainya.

E. Garis-Garis Besar Peraturan Dalam *Rumeksopuro*.

Agar tugas penjagaan astana Mangkunegaran terlaksana dengan baik, maka para anggota *Rumeksopuro* harus mematuhi setiap peraturan yang ada didalam istana Mangkunegaran termasuk aturan tata tertib *Rumeksopuro* diantaranya adalah:

⁷⁶ *Surat Pengageng Hamongpraja Pada Tanggal 25 Februari 1948 Mengenai Perincian Rumeksopuro dan Susunan Utama Kepengurusan Rumeksopuro*. Arsip Mangkunegara VIII No 3474 ,Surakarta:Rekso Pustoko.

1. *Rumeksopuro* ini harus menjunjung tinggi kehormatan Sri Paduka Mangkunegara dan keluarga kerajaan lainnya serta kehormatan presiden RI beserta para pegawai pemerintah RI lainnya.
2. Anggota *Rumeksopuro* harus menjaga semua tingkah laku, perbuatan dan perkataannya terhadap semua atasannya.
3. Anggota *Rumeksopuro* harus menjalankan semua perintah dari atasannya baik lisan maupun tertulis serta peraturan lainnya.
4. Anggota *Rumeksopuro* harus menjalankan semua kewajibannya dengan sebaik-baiknya tanpa harus menimbang berat ringannya pekerjaan.
5. Anggota *Rumeksopuro* harus patuh kepada pemimpinnya meskipun kekuasaan pimpinan itu telah diserahkan kepada pemimpin lain yang bukan berasal dari *Rumeksopuro*.
6. Jika salah seorang anggota *Rumeksopuro* melakukan kesalahan maka orang itu akan diberi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam *Rumeksopuro* bahkan pemerintah yang bersangkutan dapat memecat si pelanggar dari pekerjaannya.
7. Anggota *Rumeksopuro* yang sakit wajib memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan harus melaporkan kepada petugas jikalau orang tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dikarenakan sakit.
8. Dalam hal memperoleh surat izin tidak jaga anggota *Rumeksopuro* juga harus menyertakan bukti-bukti yang nyata agar diperoleh surat izin yang sah.

9. Seandainya ada anggota *Rumeksopuro* yang ingin mengadukan suatu hal hendaknya secepatnya disampaikan agar diperoleh suatu kepastian hukum yang adil.
10. Jika salah seorang anggota *Rumeksopuro* berhalangan untuk tidak melakukan tugas jaga tapi tidak melapor terlebih dahulu kepada pimpinan maka orang tersebut dianggap telah lalai dari tugas dan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian negara.
11. Jika dalam proses pengaduan menyampaikan hal-hal yang dianggap tidak patut ketika menjalani pemeriksaan maka orang tersebut telah melanggar peraturan dan dikenai hukuman.
12. Apabila seorang anggota *Rumeksopuro* terbukti melakukan pengacauan dalam suatu jawatan pemerintahan maka pemerintah akan menyerahkan orang itu kepada pihak kepolisian negara untuk menentukan hukuman yang harus diterima orang tersebut.⁷⁷

Sedangkan bagi para anggota *Rumeksopuro* yang telah melakukan pelanggaran maka pihak *Rumeksopuro* akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Garis-garis besar tentang hukuman *Rumeksopuro*, antara lain:

1. Kesalahan yang dilakukan oleh *brigade comanditen* (kepala pasukan) diluar pekerjaan jaga misalnya terlambat datang dan tidak ada keterangan pergi dan lain-lain, maka setelah diperiksa kesalahannya orang tersebut diberi hukuman yakni: hukuman pertama berupa peringatan, hukuman kedua berada di

⁷⁷ Arsip Mangkunegara VIII No. 3504, Surakarta:Rekso Pustoko.

Citrasana selama 3 jam dan hukuman ketiga berada di *Citrasana* selama 5 jam.⁷⁸

2. Bagi *brigade comanditein* (kepala pasukan) yang melakukan kesalahan disaat menjalankan tugas penjagaan maka akan diberi hukuman yakni: hukuman pertama berupa peringatan, hukuman kedua berada di *Citrasana* selama 5 jam dan hukuman ketiga juga berada di *Citrasana* selama 8 jam.
3. Barang siapa telah melakukan provokasi atau membuat sebuah kekacauan maka akan diberi hukuman yakni: hukuman pertama akan dipecat dari pekerjaan, dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian negara dengan disertai bukti-buktinya.
4. Bagi anggota *Rumeksopuro* yang melakukan kesalahan diluar jam tugas maka akan diberi hukuman antara lain hukuman pertama mendapat peringatan, hukuman kedua ditahan dirumah jaga selama 5 jam, dan hukuman ketiga ditahan dirumah jaga selama 8 jam.
5. Bagi yang melakukan kesalahan dalam memukul lonceng dan tidak memberi hormat akan diberi hukuman berupa hukuman pertama berupa peringatan, hukuman kedua disuruh naik jaga selama 12 jam dan hukuman ketiga disuruh naik jaga selama 24 jam.
6. Barang siapa yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas jaga seperti mengantuk atau meninggalkan tempat jaga tanpa izin komandan jaga maka akan diberi hukuman berupa hukuman pertama setelah menyelesaikan tugas

⁷⁸ Citrasana adalah pegawai bagian istana Mangkunegaran yang mengurus segala hal mengenai pegawai-pegawai istana Mangkunegaran. Wawancara dengan Bapak Sunarso .P tanggal 26 September 2006.

jaga si pelanggar disuruh naik jaga lagi selama 12 jam dan hukuman kedua si pelanggar disuruh naik jaga lagi selama 24 jam.

7. Setiap hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan, maka hukuman itu dilakukan setelah menyelesaikan kewajiban berjaga.
8. Jika dalam masa hukuman mereka mendapat sebuah tugas maka terlebih dulu si pelanggar menyelesaikan tugas yang diberikan dan setelah itu baru menjalankan hukuman tersebut.
9. Jika seseorang mendapat hukuman lebih dari 3 jam maka orang itu boleh mendapat makan minum dari pemerintah.⁷⁹

Disamping praturan-peraturan diatas, pemerintah Mangkunegaran juga menetapkan peraturan mengenai jadwal plaksanaan tugas jaga. Peraturan ini dibuat dengan maksud agar dalam proses pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar tanpa ada kendala dan juga dalam segi pembagian tugas dapat terlaksana secara adil. Peraturan penjagaan istana Mangkunegaran itu ditetapkan sebagai berikut:

1. Penjagaan diadakan siang dan malam yang bertempat di ruangan kantor kabupaten *Hamongpraja* atau di ruangan yang mudah didengar berita-berita radio.
2. Pada hari kerja penjagaan dimulai pada jam 08.00 pagi sampai 14.00 siang. Penjagaan dapat dilakukan oleh para pegawai kantor. Adapun yang bertanggungjawab pada waktu itu adalah 3 orang pegawai yang ditunjuk dalam daftar penjagaan.mereka yang sedang melakukan tugas jaga tidak

⁷⁹ *Ibid.*

diperkenankan meninggalkan tempat jaga kecuali ada keperluan yang sangat penting dengan seizin dari pembesar jawatannya.

3. Penjagaan dibagi atas beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang pegawai.
4. Dalam waktu sehari semalam pembagian tugas penjagaan adalah sebagai berikut: jam 08.00 sampai dengan 14.00 siang, jam 14.00 sampai dengan 20.00 malam, dan jam 20.00 sampai dengan 08.00 pagi (tidur di astana).
5. Para penjaga dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 orang pelayan ordonansi dari barisan Rumeksopuro yang bertempat tugas di *Pencaosan* dan pembagian tugas diatur oleh kantor *Narapraja*.
6. Penjagaan diatur seemikian rupa sehingga bagi mereka yang mendapatkan giliran jaga berikutnya dapat makan terlebih dahulu di rumahnya masing-masing.
7. Pada waktu jaga di siang hari para mendapatkan minum teh sedangkan yang berjaga pada malam hari mendapatkan minum teh atau kopi.
8. Bagi mereka yang mendapat giliran jaga pada hari libur (minggu dan hari besar) diberi kesempatan beristirahat yang waktunya akan diatur secepatnya.
9. Peraturan lain yang berkaitan dengan penjagaan akan menyusul.⁸⁰

Dengan adanya peraturan yang dibentuk dan ditetapkan bagi anggota *Rumeksopuro*, keselamatan Mangkunegaran akan terjaga dari bahaya musuh yang datang untuk menguasai wilayah Surakarta. Disamping itu juga peraturan-peraturan itu dapat menanamkan sikap disiplin bagi semua anggota *Rumeksopuro*

⁸⁰ Arsip Mangkunegara VIII No.3466, Surakarta: Rekso Pustoko.

tanpa terkecuali sehingga tujuan utama dari pembentukan *Rumeksopuro* dapat terwujud.

BAB IV

PERKEMBANGAN *RUMKSOPURO*

DI PRAJA MANGKUNEGARAN PADA MASA TRANSISI

KEMERDEKAAN INDONESIA

**A. **Aktivitas Lembaga Keamanan *Rumeksopuro* di Praja
Mangkunegaran.****

Sepanjang perkembangan jaman *Rumeksopuro* juga melakukan berbagai aktivitas guna mendukung terlaksananya tugas penjagaan istana terutama mengenai peningkatan kemampuan dari para personil *Rumeksopuro*, jadi dari pihak pemerintah Mangkunegaran melakukan berbagai aktivitas diantaranya adalah:

1. Latihan Para Anggota *Rumeksopuro*.

Rumeksopuro merupakan pasukan militer milik Mangkunegaran yang telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu terjadi karena dampak dari pergantian pemerintahan asing yang berkuasa di Indonesia. Masing-masing periode pemerintahan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Karena kondisi yang berbeda-beda itu pasukan Mangkunegaran berusaha beradaptasi terhadap segala hal agar tetap bertahan hidup. Usaha itu dilakukan dengan cara mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pada saat itu meski terkadang banyak merugikan pasukan itu sendiri.

Mulai sejak berdirinya praja Mangkunegaran sampai masa kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan Mangkunegaran selalu melakukan latihan-latihan kemiliteran. Anggota *Rumeksopuro* pun melakukan latihan-latihan yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pasukan. Sehingga dengan latihan-latihan ini diharapkan dapat lebih siap untuk menghadapi serangan musuh yang lebih kuat baik dari segi kemampuan maupun persenjataan dibandingkan kekuatan diri sendiri.

Latihan kemiliteran untuk pasukan Mangkunegaran juga pernah diperoleh dari pemerintah Jepang secara langsung dengan melakukan latihan baik dengan medan darat maupun medan udara. Perlu diketahui selama masa pemerintah Jepang semua kekayaan bangsa Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran guna kepentingan perang Jepang termasuk kekayaan berupa tenaga kerja manusia. Para pemuda di daerah-daerah diwajibkan mengikuti latihan militer dan semi militer yang merupakan pusat indoktrinasi dari Jepang dengan memberikan pelajaran *Seisin* kepada para pemuda Indonesia.⁸¹ Pembentukan badan kemiliteran atau semi militer Jepang seperti *Heiho*, *Peta*, *Seinendan*, *Keibodan*, *Kenpetai*, *Gakutotai*, *Shishintai*, *Jibakutai*, dan lain-lain ternyata membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu lembaga-

⁸¹ *Seisin* adalah pelajaran yang menerapkan cita-cita kesemakmuran bersama Asia Timur Raya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, halaman 85.

lembaga kemiliteran bentukan Jepang ini nantinya yang akan menjadi inti dari pembentukan TNI.⁸²

Para pemuda tidak hanya dilatih perang-perangan dengan medan darat tapi juga dilatih *Kusukeiho*.⁸³ Latihan kemiliteran kedua (*Hoosi II*) dilakukan oleh anggota *Gakutotai* pada tanggal 27 Mei 1945 dan bertempat disekitar kota Surakarta. Dalam latihan ini pasukan dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pasukan musuh. Pasukan ini berjumlah 96 orang yang terdiri dari:
 - 1) Tentara payung terdiri dari: Sekolah Menengah Tehnik dan 1 orang *Shotai*.⁸⁴ Pasukan yang berjumlah 50 orang ini memakai helm, mekuju dan bersenjata bayonet putih.
 - 2) Tentara bagaian darat terdiri dari: Sekolah Menengah 1 dan 1 orang *Shotai*. Pasukan yang berjumlah 40 orang ini memakai helm, mekuju dan bersenjata bayonet putih.
 - 3) bagian mata-mata berjumlah 6 orang dari anggota S.T.N. bagian ini memakai seragam yang bertanda huruf M berwarna merah.
- b. Pasukan *Guerilla*. Pasukan ini berjumlah 180 orang yang terdiri dari:
 - 1) S.G.L dan 2 orang *Shotai*. Bagian ini berjumlah 90 orang dan memakai topi pandan serta membawa mekuju.

⁸² Anton Haryoto, 1994, *Politik Penguasa dan Strategi Pemuda* "Militer Pemuda Pejuang Bersenjata RI dari Pendudukan Menuju Pertempuran", Yogyakarta: Kanisius, halaman 98.

⁸³ *Kusukeiho* adalah latihan dalam menghadapi bahaya serangan udara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, halaman 87..

⁸⁴ *Shotai* adalah istilah untuk kepala regu dalam latihan kemiliteran Jepang (*Hoosi II*).

2) Sekolah Menengah 1 dan 1 orang *Shotai*. Bagian ini berjumlah 40 orang dan membawa mekuju.

3) Sekolah Menengah Panti Parama dan 1 orang *Shotai*. Bagian ini berjumlah 50 orang yang memakai topi pandu dan membawa mekuju.⁸⁵

Tabel 5. Rencana lengkap latihan gabungan *Gakutotai* pada tanggal 27 Mei 1945 adalah:⁸⁶

Pekerjaan	Oleh Sekolah	Jumlah orang
Tentara Pelajar	Sekolah Menebgah Tehnik	50
Tentara Darat	Sekolah Menengah I	40
Barisan Pertahanan	S.G.L, Sekolah Panti Parana,dan Sekolah Menengah I	180
Barisan Pemadaman Api	S.T.N	122
P.P.P.K	Sekolah Menengah Tehnik dan Ardjuna	28
Rumah Sakit Penolong	SKPS,M.Wisno, dan M.Rahajoe	19
Perawatan Anak-anak	S.M.P dan S.G.T	60
Mata-mata Musuh ke S.T.N	Sekolah Menengah Tehnik	6
Pengangkutan Bahan Makanan	Kanisius, S.D.M, dan Sekolah Menengah I	110
Dapur Umum	S.K.P.N	20
Pengangkutan Makanan	Sekolah Menengah I dan Ardjuna	81
Jumlah		716

Sumber : Arsip Mangkunegara VIII No 3505,Surakarta:Rekso Pustoko.

Latihan *Hoosi* pada angkatan ke IV yang dijalankan berdasarkan pengawasan dari pemerintah militer Jepang ini terpaksa dibubarkan karena terjadi revolusi kemerdekaan. Pada masa revolusi itu juga banyak anggota *Rumeksopuro* yang tersebar ke dalam laskar-laskar pejuang lainnya untuk melanjutkan cita-citanya. Meskipun demikian anggota penjaga keamanan istana Mangkunegaran ini tetap melakukan beberapa latihan ringan seperti: gerakan-gerakan dasar dalam

⁸⁵ Arsip Mangkunegara VIII No 3505, Surakarta:Rekso Pustoko.

⁸⁶ *Ibid.*

baris-berbaris dan aba-aba yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Latihan ringan ini dilakukan setiap hari (7 hari) dari jam 8 sampai dengan jam 10 siang.

2. Proses pelaksanaan jaga dan pergantian jaga.

Pasca proklamasi kemerdekaan RI merupakan saat-saat yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia. Pada masa ini banyak sekali terjadi insiden-insiden yang dilakukan para pemuda Indonesia dalam rangka mengambilalih semua simbol kekuasaan asing. Proses pengambilalihan kekuasaan ini banyak memakan korban tidak hanya dalam segi materil tetapi juga jiwa raga. Kondisi semacam ini menimbulkan suasana mencekam dan menimbulkan rasa ketakutan bagi rakyat Indonesia.

Kekacauan di beberapa daerah telah membuat pemerintah harus mengambil langkah yang hati-hati dan tetap menjaga keamanan demi kelangsungan hidup negara yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini. Usaha ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah Surakarta baik dari pihak pemerintah Kasunanan maupun pemerintah Mangkunegaran. Tugas menjaga keamanan wilayah daerah sudah selayaknya menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Kasunanan bersama pemerintah Mangkunegaran saling bahu-membahu menjaga keamanan wilayah kekuasaannya selain itu juga dibantu dengan pihak pemerintah pusat yakni departemen ketentaraan RI.

Penjagaan atas wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan dibebankan kepada pihak kerajaan itu sendiri. Pemerintah Kasunanan bertanggungjawab menjaga keamanan lingkungan kekuasaannya begitu juga dengan pemerintah

Mangkunegaran, mereka bertanggungjawab menjaga dan melindungi rakyatnya salah satunya dengan membentuk *Rumeksopuro*.

Pembentukan badan keamanan yang khusus menjaga keamanan lingkungan istana sangat berguna bagi keamanan istana dari serangan musuh yang ingin meletakkan kembali kekuasaan di wilayah ini. Dalam *Rumeksopuro* ditetapkan berbagai macam peraturan guna mewujudkan cita-cita itu. Peraturan itu tidak hanya mengatur jadwal pelaksanaan tugas tetapi juga mengatur tentang siapa saja yang boleh masuk lingkungan istana. Pada masa genting orang yang tidak boleh masuk istana antara lain:

- a. Orang preman atau orang BPA yang tidak dihitung sebagai orang jaga pada saat itu. Mereka itu tidak diperkenankan masuk rumah jaga melainkan jika hendak bertemu dengan kepala jaga untuk keperluan dinas.
- b. Orang jaga tidak boleh diperintah untuk keperluan yang bukan dinas.
- c. Orang preman tidak diperkenankan menyuruh orang jaga untuk keperluan apapun juga.
- d. Orang jaga tidak diperkenankan berbicara dengan orang preman jika tidak mengenai pekerjaan.
- e. Orang jaga tidak diperkenankan membeli apapun disaat jaga.

Petugas penjaga dapat melarang orang-orang tertentu masuk ke wilayah istana. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuknya pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi pemerintahan Mangkunegaran sebagai langkah mudah menghancurkan Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun orang-orang yang dilarang masuk kedalam lingkungan istana Mangkunegaran diantaranya adalah:

- a. Orang yang berpakaian tidak pantas atau pakaian yang menjadi larangan pihak istana.
- b. Para pedagang dan tukang petang.
- c. Orang yang memakai topi.
- d. Orang yang naik sepeda.
- e. Para pesuruh atau kuli yang tidak memakai tanda.
- f. Orang sakit jiwa.
- g. Orang asing kecuali para pembesar. Jika seseorang ingin bertemu dengan salah seorang pembesar atau seorang pegawai kantor didalam istana Mangkunegaran haruslah menemui kepala jaga terlebih dahulu. Selanjutnya orang itu diantar oleh orang jaga untuk menemui pembesar tersebut.
- h. Lain-lain.

Orang yang hendak masuk kantor *superintenden* dari pintu gerbang timur bisa masuk meskipun berpakaian bebas dengan syarat atas dasar permintaan dari kantor tersebut.
- i. Binatang seperti anjing dilarang masuk.
- j. Penjaga harus menutup pintu gerbang timur ketika kantor-kantor di Praja Mangkunegaran tutup pada jam 15.00 dan buka kembali pada jam 06.30, sedang pintu bagian muka ditutup pada jam 19.00.
- k. Jika ada perintah dari bagian *Pencaosan* mengenai apa saja harus dengan segera dijalankan dan kemudian diteruskan ke pemimpin atau wakilnya.

Peraturan juga tidak hanya berlaku untuk bagian halaman depan istana Mangkunegaran tapi juga ada peraturan penjagaan dilingkungan sekitar ujung puri, adapun larangan-larangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Melarang orang memetik bunga atau buah-buahan melainkan orang itu telah disuruh oleh Sri Paduka Mangkunegaran.
- b. Melarang orang berhenti dipagar besi terlebih pada waktu malam.
- c. Pengawal harus turun dari tempatnya jika kolam dipakai.
- d. Mengawasi semua orang yang bermain di taman istana.
- e. Hal dan kejadian luar biasa harus segera dilaporkan kepala jaga.
- f. Para pengawal harus selalu awas mata jika setiap satu terjadi sesuatu yang dianggap mencurigakan dan harus selalu dalam keadaan siap.⁸⁷

Peraturan diatas merupakan peraturan pelengkap dari peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin BPA sebelumnya. Dan untuk mengantisipasi munculnya kekacauan didalam istana maka dibuatlah peraturan jaga untuk istana pada tanggal 19 Juni 1946, diantaranya:

1. Semua kendaraan dilarang masuk lingkungan istana tanpa seijin petugas jaga kecuali kendaraan milik Seri Paduka Mangkunegaran.
2. Pintu gerbang barat dan timur ditutup setelah jam kantor selesai sedangkan pintu muka (utama) ditutup pada jam 07.00 malam dan kembali dibuka pada jam 06.30 pagi, pada hari libur gerbang barat dan timur tetap tertutup dan apabila semua pintu gerbang telah tutup tidak boleh ada orang yang membukanya kembali kecuali atas permintaan Seri Paduka Mangkunegaran.

⁸⁷ Arsip Mangkunegara VIII No 3504, Surakarta:Reksopustoko.

3. Semua tamu yang hendak bertemu dengan Seri Paduka Mangkunegaran diharapkan lapor terlebih dahulu kepada *Rumeksopuro* dan setelah mendapat izin barulah tamu tersebut diantarkan ke bagian pecaosan untuk dipertemukan dengan Seri Paduka Mangkunegara.
4. Pada hari-hari biasa baik pegawai Mangkunegaran maupun anak-anak sekolah diijinkan untuk berjalan melintasi lingkungan istana Mangkunegaran. Namun terdapat larangan bagi para penjual untuk menjual dagangannya di lingkungan ini kecuali bila mendapat izin terlebih dahulu.
5. Semua orang asing juga terlarang masuk ke dalam lingkungan istana Mangkunegaran kecuali telah mendapat izin atau membawa surat keterangan yang telah ditanda tangani oleh pejabat istana Mangkunegaran.⁸⁸

Dalam hal pergantian jaga juga diatur sehingga dapat berjalan dengan lancar. Penjaga yang akan bertugas menggantikan penjaga lain maka terlebih dahulu berkumpul dibawah pimpinan kepala jaga untuk diperiksa mengenai kelengkapan dan pakaian sebelum melakukan tugas piket. Jika sudah dianggap lengkap semua selanjutnya dilakukan pelaporan (*Hokoku*) kepada piket. Piket yang baru datang akan disambut dengan penghormatan dan akan diperiksa lagi oleh kepala jaga lama. Selanjutnya akan dilakukan pembagian tempat jaga (*Ensei*) dan semua jaga langsung melakukan tugasnya sesuai ketentuan.

Pergantian jaga di rumah jaga dilaksanakan dengan jalan sebagai berikut: regu penjaga lama berbaris disebelah kanan regu penjaga yang baru. Selanjutnya mereka saling memberi penghormatan dan dilanjutkan dilakukan

⁸⁸ Arsip Mangkunegara VIII No 3462, Surakarta:Reksopustoko.

pemeriksaan setelah selesai upacara penyerahan tugas jaga dari penjaga lama kepada penjaga baru. Penjaga lama kembali ke asrama sedang penjaga baru langsung masuk rumah jaga untuk menjalankan tugasnya. Pemeriksaan kelengkapan penjagaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kehilangan dan kerusakan yang berakibat pada kerugian bagi *Rumeksopuro*.⁸⁹

B. Badan Keamanan Lainnya yang menjaga keamanan wilayah kota Surakarta.

1. Organisasi Ketentaraan Republik Indonesia.

Kekuatan militer merupakan unsur terpenting dalam suatu negara karena dengan militer ini negara dapat menanggulangi segala macam ancaman yang setiap saat mengancam keutuhan negara. Disamping itu juga kekuatan militer suatu negara dapat dipakai sebagai untuk mengukur seberapa besar dan kuatnya suatu negara. Sehingga dinegara manapun kekuatan militer dianggap sangat penting untuk menjaga keamanan wilayah suatu negara.

Sejarah perkembangan militer di Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia dimana masih berbentuk laskar-laskar perjuangan yang tersebar diberbagai daerah dan berdiri sendiri-sendiri. Setelah bangsa Indonesia mulai sadar akan pentingnya kekuatan militer untuk berjuang demi tercapainya cita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan terlepas dari kungkungan penjajah maka pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah sebuah departemen keamanan rakyat tetapi pemegang jabatan menteri keamanan rakyat belum

⁸⁹ Arsip Mangkunegaran VIII No 3462, Surakarta: Reksopustoko.

ditentukan.⁹⁰ Namun hasil sidang itu mengalami perubahan dalam sidang berikutnya.

Sidang pada tanggal 23 Agustus 1945 PPKI secara resmi membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Sebagian besar bekas anggota PETA mendaftarkan diri ke BKR sedang mereka yang tidak setuju dengan pembentukan badan ini selanjutnya membentuk laskar perjuangan sendiri. Dengan kondisi semacam ini tidak mengherankan jika di beberapa daerah bahkan di luar pulau Jawa muncul laskar-laskar perjuangan seperti di Jakarta terbentuk Komite Van Aksi yang merupakan gabungan dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara), dan Barisan Buruh Indonesia, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) di Bandung, Angkatan Muda Indonesia (AMI) di Jawa Timur, Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Sumatera Barat, Pembela Keamanan Rakyat (PKR) di Sumatera Selatan dan lain sebagainya.⁹¹

Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Indonesia menyatukan BKR-BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara laskar-laskar pejuang. Pada kesempatan ini pula pemerintah juga mengumumkan personalia didalam Departemen Keamanan Rakyat. Namun pada tanggal 1 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, ini dimaksudkan agar tanggungjawabnya di bidang pertahanan menjadi lebih luas. Pada tanggal 24

⁹⁰ Sukardi Sosro Hadi Handojo, 1990, *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Jakarta: Markas Besar ABRI Pusat Senjata dan Tradisi ABRI, halaman 17.

⁹¹ *Ibid*, halaman 17.

Januari 1946 TKR mengalami perubahan nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pada tanggal 3 Juni 1947 kembali mengalami perubahan nama dan terjadi penyatuan antara tentara regular dengan laskar-laskar dalam wadah yang sekarang kita kenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁹²

Peranan TNI sangatlah penting dalam masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu TNI berjuang mempertahankan dan mengamankan wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia baik dari pihak pemerintah Belanda maupun pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara kesatuan Indonesia. Dalam menjalankan tugas yang begitu besar ini TNI tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri tapi juga dibantu oleh masyarakat yang setia kepada negara Republik Indonesia.

Tanggungjawab atas keamanan wilayah Surakarta tidak hanya diserahkan kepada pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran saja tapi juga menjadi bagian dari tanggungjawab pihak Ketentaraan Republik Indonesia dan Kepolisian Karisidenan Surakarta. Hal ini seperti apa yang tertulis dalam surat perintah dari Dewan Pertahanan Daerah Surakarta No 33, adalah sebagai berikut:

“Mengingat pula akan surat dari Yang Mulia Menteri Muda Dalam Negeri Negara Republik Indonesia kepada Sri Paduka Mangkunegara VIII dan Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono XII tertanggal 3 Agustus 1947:

Memerintahkan:

Kepada : Kepala Kepolisian Negara Karesidenan Surakarta.

⁹² Soebijono, A.S.S. Tambunan, Hidayat Mukmin, dan Roekmini Koesoema Astoeti., 1992, *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, halaman 10-15.

- Kesatu : menjaga Istana Sri Paduka Mangkunegara VIII dan Sri Paduka Susuhunan XII.
- Kedua : untuk menjalankan perintah ini diperbolehkan minta bantuan dari Polisi Tentara.
- Ketiga : menjalankan perintah ini dengan selekas-lekasnya.
- Keempat : surat perintah ini disampaikan /diaturkan kepada:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Karesidenan Surakarta.
 - b. Kepala Markas Polisi Tentara.
 - c. Paduka Tuan Pembesar Pemerintah Keraton.
 - d. Paduka Tuan Pembesar Pemerintah Mangkunegaran.
 - e. Sekretariat Dewan Pertahanan Negara di Yogyakarta.
 - f. Paduka Tuan Komandan Territorial Surakarta.”⁹³

Surat perintah diatas membuktikan bahwa tanggung jawab keamanan atas wilayah Surakarta tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat tapi juga menjadi tanggungjawab bersama dengan badan ketentaraan Republik Indonesia serta dibantu oleh masyarakat sehingga keamanan dengan mudah dapat tercipta. Ini memperlihatkan kerjasama antara Rumeksopuro dengan badan keamanan lainnya. Meskipun begitu dalam pelaksanaannya terdapat pembagian tugas. Ini dimaksudkan agar masing-masing badan keamanan lebih fokus pada wilayah yang menjadi wewenangnya. Dalam surat Mangkunegaran VIII kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman tertulis bahwa:

“Perloe kami kemoekakan lagi bahwa menoeroet peroendingan dan persetoejoean antara divisi dari Mangkoenegara tanggal 16-VI-1946 jang kami harapkan adalah:

- 1.Pendjagaan loear astana jang disanggoepkan kepada kami oleh Tentara Repoeblik Indonesia.
- 2.Pendjagaan dalam astana oleh Barisan Pendjaga Astana Mangkoenegaran sendiri.
- 3.Mengharap menerima kembali 20 karabijn dan 20 klewang, dari antara alat sendjata jang telah kami pindjamkan kepada Tentara Repoeblik Indonesia Soerakarta, oentoek Barisan Pendjaga Astana Mangkoenegaran.”⁹⁴

⁹³ Arsip Mangkunegaran VIII No 3465, Surakarta:Rekso Pustoko.

⁹⁴ Arsip Mangkunegara VIII No 3465, Surakarta:Rekso Pustoko.

Dari beberapa surat diatas memperlihatkan adanya kerjasama antara pemerintah wilayah Surakarta dengan pihak pemerintah pusat terutama Departemen Keamanan Rakyat dalam menghadapi berbagai kemungkinan datangnya ancaman serangan musuh yang akan membahayakan keutuhan wilayah negara Indonesia.

2. Badan Pengawas Oedara (B.P.O).

Dinas perlindungan udara dibentuk pertama kali di Surabaya pada bulan Februari 1937 dan untuk yang terakhir kalinya dibentuk di Tarakan pada bulan April 1938. Pembentukan badan ini dimaksudkan karena wilayah Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau yang kemungkinan besar memperoleh serangan musuh dari udara tidak sama besarnya.

Menurut Mayor J.H. Van Riessen selaku pejabat Perlindungan Udara Belanda (*Onderin specteur*), bahwa dinas penjaga udara atau *Lucht Beschermings Diensts* (L.B.D) adalah sebuah usaha penjagaan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan maksud untuk mengantisipasi usaha penyerangan musuh lewat udara. Pembentukan dinas ini hanya bertujuan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan surat pemerintah tanggal 21 Januari 1937 dimana pemerintah Hindia Belanda meminta dibentuknya dinas penjaga keamanan udara didaerah-daerah. Prioritas utama penempatan dinas penjagaan udara ini adalah

⁹⁵ R.Pringgodihardjo,"Perlindungan Udara I",*Panji Pustaka* No 55 tanggal 12 Juli 1938tahun ke XV,Balai Pustaka:Batavia Centrum,halaman 1064.

daerah yang banyak terdapat pemukiman penduduk asing dan pusat pemerintahan. Dengan kategori semacam itu maka Surakarta dan Yogyakarta termasuk dalam kategori daerah yang akan dibentuk dinas keamanan udara ini.

Kondisi keuangan negara yang sedang sulit dan *gemeente-gemeente* yang banyak memikul biaya maka dinas penjagaan udara dibentuk dengan sangat sederhana. Dengan surat pemerintah yang disebarkan melalui pengumuman Sekretaris I tanggal 21 Januari 1937 No 143A dan 144 mendorong Mangkunegaran VII untuk mengadakan rapat pada hari rabu tanggal 27 Februari 1937. Dalam rapat itu Mangkunegara VII beserta para pembesar Praja Mangkuegaran membahas mengenai bahaya udara yang sewaktu-waktu masuk wilayah Surakarta.⁹⁶

Pada masa revolusi kemerdekaan, dinas perlindungan udara ini juga digunakan untuk membantu menjaga keamanan wilayah Surakarta bersama-sama dengan badan keamanan lainnya seperti *Rumeksopuro*. Dinas ini bertindak sebagai badan yang memberi tanda bahaya akan datangnya serangan musuh lewat udara dengan jalan membunyikan sirine. Adapun cara menyampaikan tanda bahaya serangan musuh kepada masyarakat tertulis dalam surat turunan dari Dinas Penerangan Rakyat mengenai pengumuman penjagaan bahaya udara daerah Surakarta No 9, yakni:

1. Tanda “bersedia” dinyatakan dengan membunyikan sirine selama 1 menit atau dengan menggunakan genjor yang dipuku-pukul sebanyak dua kali tiga rebahan

⁹⁶ R.Pringgodihardjo, “Perlindungan Udara III”, *Panji Pustaka* No 60 tanggal 29 Juli 1938 tahun ke XVI, Balai Pustaka:Batavia Centrum, halaman 1156.

(00,00,00) dan cara ini dilakuakn secara berulangulang. Selain itu juga dengan cara meempatkan bendera putih ditempat yang dapat terlihat.

2. Tanda “serangan” dinyatakan dengan membunyikan sirine berombak-ombak selama kurang lebih 1 menit atau dengan memukul genjor secara terus-menerus dan bendera putih diturunkan dan diganti dengan bendera merah.
3. Tanda serangan selesai dinyatakan dengan cara seperti no 1 tapi sebagian.
4. Tanda “aman kembali” dinyatakan dengan tana seperti no 1 sampai dengan no 2, setelah 15 menit daritanda tersebut dan tidak disusul dengan tanda lain maka keadaan dapat dinyatakan aman kembali sedangkan genjor dibunyikan secara uluk-uluk.⁹⁷

Dalam dinas penjagaan udara ini ditempatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan dibidang senjata dan juga pengetahuan tentang kekuasaan wilayah udara.⁹⁸

3. Organisasi Penjagaan Kampung.

Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950 merupakan periode yang penuh diwarnai berbagai peristiwa yang memperlihatkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam dan bahkan bangsa Indonesia rela berkorban jiwa raga demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini pula banyak sekali ancaman yang siap menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengganggu keamanan dan ketenteraman didaerah-daerah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk

⁹⁷ Arsip mangkunegara VIII No 3505, Surakarta:Rekso Pustoko.

⁹⁸ Dyah Hayu Rinawati,C0587013,1994,*Dinas Perlindungan Udara (Lucht Beschermings Dients*,Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS,halaman 89.

Rumeksopuro guna menjaga keamanan wilayah Praja Mangkunegaran yang bertindak sebagai pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat atas segala hal yang berhubungan dengan kelangsungan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan suatu keadaan yang aman di wilayah Surakarta, *Rumeksopuro* yang dibentuk oleh pemerintahan Mangkunegaran juga membutuhkan kerjasama dengan organisasi keamanan lainnya yang berada diluar tembok istana Mangkunegaran. Suasana aman akan mudah tercipta apabila telah terwujud kondisi yang aman dalam sekup yang kecil seperti dalam kampung-kampung. Maka dari sini diciptakanlah organisasi keamanan kampung.

Organisasi keamanan kampung ini dibentuk karena masalah keamanan kampung merupakan tanggungjawab segenap warga kampung. Hal ini seperti yang disebutkan dalam *verslag* singkat *conferentie* pamongpraja pemerintahan Kasunanan dan pemerintah Mangkunegaran pada tanggal 5 Mei 1949 yang membicarakan mengenai keamanan kota:

“Keamanan kampoeng mendjadi tanggoengdjawab segenap pendoedoek kampoeng maka loerah diharapkan membentoek organisasi keamanan oentoek mendjaga keamanan kampoeng dengan bantoean pemerintah secoekoepnya misalnja pemerintah Kasoenanan menyediakan dana f15.000 seboelan oentoek keamanan dan orang jang membantoe mengoeroes mendapat distriboesi sebagai pegawai ataoe pekerdja pemerintah seperti dalam organisasi *Tonarigoemi* di masa pemerintahan Djepang. Tiap kampoeng mendirikan gardoe pendjagaan dan bila perloe diperkenankan menoetoep djalan-djalan kampoeng apabila moencoel serangan moesoeh secara tiba-tiba.”⁹⁹

⁹⁹ Verslag Singkat Conferentie Pamongpraja Kasunanan dan Mangkunegaran. Arsip Mangkunegara VIII No 907, Surakarta: Rekso Pustoko.

Pada awalnya di wilayah Surakarta hanya dibentuk 4 buah pos penjagaan polis yang bersenjata yang tersebar di Jagalan, Gading, Tipes (Sidokare), dan Bumi. Apabila penjaga kampung hendak berhubungan dengan pihak pos polis untuk memberitahukan bahwa ada bahaya dan meminta pertolongan maka harus membawa *oncor* dan surat keterangan (*legitimasi bewijs*) yang telah ditandatangani dan diberi cap oleh lurah setempat dan *asisten Wedana*. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas, lampu senter (*flash light*) diperbolehkan untuk digunakan malahan pihak keamanan kota (*stadsewakings dienst*) bersedia menyediakan baterai dan bola lampunya. Dan untuk sarana persenjataan para penjaga kampung diperbolehkan memakai *steek* dan *slagwapens* seperti tembak, *klewang*, dan *pentung*.¹⁰⁰

4. Laskar Rakyat.

Laskar rakyat berdiri pada tanggal 22 November 1945 dengan nama Markas Daerah Laskar Rakyat kabupaten Mangkunegaran yang merupakan cabang dari Surakarta dan diketuai oleh Saridi. Namun ada tanggal 14 Juni 1946 berubah bentuk menjadi *Zelfstandig* organisasi, disamping itu juga berdiri Gabungan Laskar Pertahanan Surakarta (GLPS). Selanjutnya kedua badan ini bergabung menjadi satu dimana untuk wilayah kota Mangkunegaran diberi nama GLPS seksi V sedang wilayah Surakarta diberi nama Markas Kota GLPS dan kedua bagian ini tetap diketuai oleh Saridi. Laskar rakyat ini bertugas memberi

¹⁰⁰ *Ibid.*

penerangan kepada rakyat tentang mobilisasi dan melakukan segala usaha dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰¹

5. Panitia Darurat Keamanan Daerah Surakarta (P.D.K.S).

Panitia Darurat Keamanan Daerah Surakarta ini didirikan pada tanggal 31 Desember 1948 atas prakarsa dari pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran serta diketuai oleh R.P. Hatmowardojo. Sehingga bentuk dari badan adalah federatie dengan hak otonomi bagi masing-masing pihak. Kedudukan P.D.K.S ini berada di dalam ibukota Surakarta. P.D.K.S yang berintikan kekuatan rakyat Surakarta ini bertugas mengambilalih bagian dalam menjalankan keamanan di daerah Surakarta.¹⁰²

6. Polisi Keamanan Surakarta.

Semenjak terjadinya revolusi kemerdekaan kondisi keamanan dalam kota Surakarta semakin mundur. Hal ini tampak dengan semakin meningkatnya kasus kejahatan seperti penghendoran, pencurian, perampokan dan lain-lain, maka dibentuklah polisi keamanan dibawah tanggungjawab pemerintah Mangkunegaran. Namun, ternyata setelah panitia pendaftaran anggota polisi keamanan terbentuk, pihak pemerintah Belanda beralih haluan. Tindakan itu disebabkan oleh pemerintah Belanda yang sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Mangkunegaran. Sehingga pemerintah Belanda meminta agar polisi Kasunanan dan polisi Mangkunegaran dipimpin oleh seorang komisaris Belanda. Kebijakan Belanda ini tidak disetujui oleh pihak pemerintah Mangkunegaran karena Mangkunegaran sendiri juga tidak percaya terhadap

¹⁰¹ Arsip Mangkunegara VIII No 3520, Surakarta:Rekso Pustoko .

¹⁰² Arsip Mangkunegara VIII No 3486, Surakarta:Rekso Pustoko.

Belanda atas arah tujuan pembentukan polisi keamanan ini apalagi bila berada dibawah pimpinan Belanda. Percekcokan ini sudah berlangsung lama. Setelah membubarkan panitia pendaftaran, pemerintah Mangkunegaran melepaskan polisi keamanan dan selanjutnya tidak bertanggungjawab atas keamanan daerah.¹⁰³

7. Territorial Battallion Surakarta.

Pada awalnya pemerintah Mangkunegaran ingin menghidupkan kembali legiun Mangkunegaran. Namun dipihak lain pemerintah Belanda telah memerintahkan Letnan Kolonel Notohatmojo untuk membentuk Territorial Battallioan Surakarta yang terlepas dari kekuasaan Mangkunegaran. Kemudian Let.kol. Notohatmojo mengeluarkan surat edaran pendaftaran yang disebarkan melalui pesawat terbang dan pendaftaran ini berlaku bagi semua orang yang memenuhi persyaratan.¹⁰⁴ Surat edaran tersebut menggunakan tanda *pare anom* (warna hijau kuning) dan disebarkan didaerah Jatisrono kabupaten Wonogiri. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah pembentukan badan ini adalah usaha dari Mangkunegaran. Sri Paduka Mangkunegara tidak setuju dengan hal itu sehingga mengajukan protes kepada Let.Kol. Notohatmojo terutama mengenai penggunaan tanda *pare anom*. Sejak pengajuan protes itu tanda *pare anom* ditarik kembali. Jadi pembentukan Territorial Battallioan Surakarta atas inisiatif pemerintah Belanda sendiri dan pihak Mangkunegaran sama sekali tidak mengetahui segala hal tentang badan ini.¹⁰⁵

¹⁰³ Arsip Mangkunegara VIII No 3488, Surakarta: Rekso Pustoko.

¹⁰⁴ Arsip Mangkunegara VIII No 3511, Surakarta: Rekso Pustoko.

¹⁰⁵ Arsip Mangkunegara VIII No 3488, Surakarta: Rekso Pustoko.

Kekuatan Territorial Batallion Surakarta ini juga adakalanya diperbantukan untuk memperkuat penjagaan yang dilakukan *Rumeksopuro* manakala terjadi serangan kedalam istana Mangkunegaran sesuai dengan ketetapan yang sudah ada.¹⁰⁶

8. *Midden Java Raad*.

Pembentukan *Midden Java Raad* juga sama dengan pembentukan badan keamanan lainnya yang didasarkan atas usaha dari pihak pemerintah Belanda. Sehingga pihak pemerintah Mangkungan juga tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pembentukan badan ini dan pada dasarnya pembentukan badan-badan keamanan ini sama yaitu ditujukan untuk mengamankan kota Surakarta.¹⁰⁷

C. Peranan Rumeksopuro.

Pada awal pembentukan *Rumeksopuro* telah dengan jelas tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan pembentukannya yakni tidak lain hanya untuk menjaga keamanan lingkungan istana Mangkunegaran. Dalam pelaksanaanya badan ini sangat berperan terutama pada saat menghadapi berbagai macam permasalahan yang muncul pada masa revolusi. Peran *Rumeksopuro* ini tidak hanya dirasakan oleh pihak istana Mangkunegaran tetapi juga dirasakan oleh rakyat disekitar istana terutama bagi mereka yang merasa dirinya sedang terancam.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Arsip Mangkunegara VIII No 3492, Surakarta:Rekso Pustoko.

¹⁰⁷ Arsip Mangkunegara VIII No 3488, Surakarta:Rekso Pustoko.

¹⁰⁸ Wawancara dengan K.R.T Soenarso Pontjoetjito pada tanggal 25 September 2006.

Pada dasarnya peranan *Rumeksopuro* sama dengan peranan satuan pengaman (satpam atau *security*) yang bertugas mengamankan kantor-kantor pemerintahan, gedung-gedung dan perusahaan-perusahaan lainnya. Peranan satuan pengamanan ini tidak hanya terbatas pada pengamanan fisik tetapi juga berperan dalam mengatasi semua masalah yang ada di wilayah pengamanannya.

Peranaan satuan pengaman dibidang pengamanan fisik sendiri diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mencegah atau mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan/ketertian dilingkungan pengawasannya dan selanjutnya peranan satuan pengamanan ini bertambah luas dimana mereka ini dapat melakukan tindakan dalam rangka mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan pengawasannya seperti: mencegah timbulnya bahaya kebakaran, perlindungan atas keselamatan kerja, kriminalitas, pencurian, penggelapan uang perusahaan, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), upaya mengatasi bencana, sistem alarm, masalah komunikasi, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian peranan satuan pengaman menjadi lebih luas dan kompleks.¹⁰⁹

Secara umum satuan pengamanan berhak mengontrol, memimpin, menetapkan dan bertindak sebagai hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan atau persoalan. Dengan demikian dapat dibedakan mengenai tugas pokok, fungsi, peranan dan kegiatan dari satuan pengamanan.

Tugas pokok seorang satuan pengaman adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerja khususnya pengamanan fisik.

¹⁰⁹ A.Handoyo,2003,*Dasar-Dasar Pengamanan Dan Usaha Jasa Keamanan (Manajemen Sekuriti)*,Jakarta:PT.Elex Media Komputindo,halaman 2-3.

Fungsi seorang satuan pengaman adalah melindungi dan mengamankan lingkungan atau kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran lainnya atau peraturan kerja sebuah kantor.

Dalam menjalankan tugasnya seorang petugas penjaga keamanan berperan sebagai unsur dalam membantu pimpinan sebuah kantor atau pemimpin pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan kekuasaannya. Jadi satuan pengamanan ini dapat dikatakan sebagai pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terutama di bidang penegakan hukum dan *security mindedness* dalam lingkungan area kerja.

Kegiatan satuan pengamanan dapat disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan serta kebutuhan masing-masing perusahaan atau kantor sebagai penjabaran dari fungsi satuan pengamanan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengamanan melakukan kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan peraturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan tersebut.
2. Melaksanaan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar dan masuknya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di wilayah kekuasaannya.
3. Melakukan perondaan di sekitar wilayah kekuasaannya menurut rute dan waktu tertentu untuk meneliti dan memeriksa segala sesuatu yang tidak wajar/mencurigakan/tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan

menimbulkan ancaman dan gangguan, mengatur kelancaran lalu lintas di luar lingkungannya kekuasaan.

4. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara jika terjadi suatu tindak pidana seperti:
 - a. Mengamankan tempat kejadian perkara.
 - b. Menangkap dan memborgol pelaku (hanya jika tertangkap tangan).
 - c. Menolong korban.
 - d. Melaporkan dan meminta bantuan Polri.
 - e. Selanjutnya memberikan bantuan serta menyerahkan penyelesaiannya kepada Polri terdekat.
5. Memberikan tanda bahaya atau keadaan darurat melalui alat-alat alarm dan kode atau isyarat tertentu jika terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian yang dapat membahayakan jiwa, badan dan harta benda serta orang banyak di sekitar lingkungannya dan memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.¹¹⁰

¹¹⁰ *Ibid*,halaman 19-20.

BAB V

KESIMPULAN

Peristiwa proklamasi kemerdekaan RI bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia karena masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita yang luhur yakni mendirikan negara Indonesia yang merdeka, adil dan makmur. Pasca kemerdekaan ini bangsa Indonesia dituntut untuk dapat mempertahankan kemerdekaan dengan cara berjuang melawan kedatangan penguasa asing yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya. Sehingga kekacauan yang terjadi menyebabkan keselamatan rakyat terancam dan yang paling utama adalah keutuhan pemerintahan RI. Oleh karena itu pemerintah daerah seperti Yogyakarta dan Surakarta bertanggungjawab penuh atas keamanan di wilayah kekuasaannya. Dalam hal ini pemerintah Mangkunegaran langsung membentuk organisasi keamanan “*Rumeksopuro*” di lingkungan istana Mangkunegaran sekaligus memberikan tempat mengungsi bagi para pejabat atau orang-orang yang merasa terancam keselamatnya. Pembentukan organisasi ini adalah salah satu tindakan yang mendukung berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, *Rumeksopuro* mengalami beberapa kali perubahan dalam hal keanggotaan dan hal kesejahteraan anggota yang meliputi gaji dan tunjangan. Perubahan keanggotaan *Rumeksopuro* disebabkan oleh kondisi revolusi kemerdekaan dimana para anggotanya mulai tersebar kedalam laskar-

laskar perjuangan lainnya sehingga untuk memenuhi tenaga keamanan dilakukan dengan cara perekrutan eks legium berdasarkan kontrak. Sedangkan perubahan dalam masalah kesejahteraan anggota disebabkan karena perubahan kondisi perekonomian pada masa revolusi disamping itu juga pembiayaan kegiatan *Rumeksopuro* ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Mangkunegaran sendiri. Selain membentuk *Rumeksopuro* pemerintah Mangkunegaran juga memberikan fasilitas pengungsian bagi orang-orang yang terancam dengan dilengkapi fasilitas kesehatan, pangan dan lainnya. Sejak adanya *Rumeksopuro* ini semua hal yang ada di lingkungan istana harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Peningkatan kualitas anggota *Rumeksopuro* juga dilakukan dengan melakukan latihan-latihan.

Pada dasarnya peranan *Rumeksopuro* ini hamper sama dengan peranan satuan pengaman (satpam atau *security*) pada masa sekarang. Pelaksanaa tugas *Rumeksopuro* ini juga bekerjasama dengan pihak kabupaten lain seperti yatanirmala, TBS, polisi keamanan, dan lascar perjuangan lainnya. Bahkan pada saat kondisi keamanan kota dalam posisi tidak aman pihak *Rumeksopuro* langsung melakukan penjagaan ketat terhadap istana Mangkunegaran dan memberi perlindungan kepada para pengungsi berdasarkan ijin dari para pembesar Mangkunegaran. Disamping itu pihak *Rumeksopuro* juga memberlakukan jam malam kepada siapapun demi keselamatan rakyat. Sehingga tugas *Rumeksopuro* pada pokoknya adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja atau kawasan kerja khususnya mengenai masalah keamanan yang bersifat fisik. Sedang fungsi dari badan keamanan ini tidak lain adalah memberikan

perlindungan dan mengamankan lingkungan atau kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan. Jadi masalah keamanan sekitar lingkungan istana sebenarnya menjadi tanggungjawab semua abdidalem Mangkunegaran tetapi pelaksanaannya dibebankan sepenuhnya kepada *Rumeksopuro*.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip/Dokumen.

Arsip Mangkunegara VIII No.907 tentang Verslag Singkat Conferentie Pamongpraja Kasunanan dan Mangkunegaran.

Arsip Mangkunegara VIII No.3465 tentang Surat Mangkunegara kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 25 Juni 1946.

Arsip Mangkunegara VIII No.1053 tentang Keterangan Ringkas Mengenai Keadaan Praja Mangkunegaran Sebelum dan Sesudah Revolusi Kemerdekaan.

Arsip Mangkunegara VIII No.3507 tentang Catatan Pendek Rapat Para Pembesar dalam Istana Mangkunegaran pada tanggal 23 November 1945.

Arsip Mangkunegara VIII No.3459 tentang Surat Keputusan dari Papatihdalem Praja Mangkunegaran No 6112/12 pada tanggal 30 November 1945.

Arsip Mangkunegara VIII No.3506 tentang Surat Kepala Jawatan Natapraja No 121/1/B tanggal 5 Maret 1947 Mengenai Bahan Makanan.

Arsip Mangkunegara VIII No.3508 tentang Laporan dari Tata Usaha No 481/P Mengenai Gaji dan Tunjangan Pegawai *Rumeksopuro*.

Arsip Mangkunegara VIII No.3501 tentang Peraturan dari Papatihdalem Mangkunegaran pada tanggal 25 Maret 1949 Mengenai Peraturan Asrama *Rumeksopuro*.

Arsip Mangkunegara VIII No.3474 tentang Surat Pengageng Hamongpraja pada tanggal 25 Februari 1948 Mengenai Perincian *Rumeksopuro* dan Susunan Utama Kepengurusan *Rumeksopuro*.

Buku-buku.

- A.Handoyo.2003. *Dasar-Dasar Pengamanan dan Usaha Jasa Keamanan (Manajemen Sekuriti)*.Jakarta:PT. elex Media Komputindo.
- A.H.Nasution.1992. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 5*.Bandung:PT.Angkasa Bandung.
- A.K.Pringgodigdo.1938. *Lahir dan Tumbuhnya Kerajaan mangkunegaran*.Surakarta:Rekso Pustoko.
- Anton Haryoto.1994. *Politik Penguasa dan Strategi Pemuda “Militansi Pemuda Pejuang Bersenjata RI dari Pendudukan Menuju Pertempuran”*.Yogyakarta:Kanisius.
- Cahyo Budi Utomo.1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*.Semarang:IKIP Semarang Press.
- C.S.T.Kansil dan Julianto.1998. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Indonesia*.Jakarta:PT. Erlangga.
- De Jong.1976. *Salah Satu Sikap Orang Jawa*.Semarang:Yayasan Kanisius.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1978.*Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*.Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono dan restu Gunawan.1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*.Jakarta: CV. Ilham Bangun Jaya.
- G.Moedjanto.1988. *Indonesia Abad ke 20 jilid I dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*.Jakarta:Kanisius.
- G.P.Rouffear.1983. *Swapraja diterjmahkan oleh M.H.Pringgokusumo*.Surakarta:Rekso Pustoko.
- Irawan Soejito.1990.*Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Larson, George.D.1990.*Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Surakarta 1912-1942*.Yogyakarta:UGM Press.
- Ojong.P. 2001.K.*Perang Pasifik*.Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
- Marwati Djoened, Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto.1993.*Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*.Jakarta:Balai Pustaka.
- M.Dalyono.1939.*Ketataprajaan Mangkunegaran*.Surakarta:Rekso Pustoko.

- Metz.Th.M.1939. *Mangkunegaran, Analisa Sebuah Kerajaan Jawa diterjemahkan oleh M.Husodo*.Surakarta:Rekso Pustoko.
- M.Solly Lubis.1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*.Bandung:Penerbit Alumni.
- Murdijo Djungkung.1988.*Pertempuran Empat Hari di Kota Solo Agustus 1949*.Surakarta.
- Nugroho Notosusanto.1978. *Masalah Penelitian Sejarah Suatu Pengalaman*.Jakarta:Yayasan Idayu.
- Rajiman.1991. *Masyarakat Jawa*.Surakarta:Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS.
- Riclefs, M.C. 1994.*Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta:UGM Press.
- R.Pringgodihardjo. "Perlindungan Udara I" *Panji pustaka No 55 pada tanggal 12 Juli 1938 tahun XVI*.Jakarta.Balai Pustaka Batavia Centrum.
- . "Perlindungan Udara III" *Panji pustaka No 60 pada tanggal 29 Juli 1938 tahun XVI*.Jakarta.Balai Pustaka Batavia Centrum.
- Sartono Kartodirdjo.1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- .1999..*Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 jilid I*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo, A.Sudewa, dan Suhardjo Hatmosuprobo.1993. *Perkembangan Peradaban Priyayi*.Yogyakarta:UGM Press.
- Sarwanto Wiryosaputro.1978. *Legiun Mangkunegaran*.Surakarta:Rekso Pustoko.
- Sastrodihardjo.1987. *Riwayat K.G.P.H.Mangkunegara I*.Surakarta:Rekso Pustoko.
- S.Margana.2004. *Keraton Surakarta dan Yogyakarta (1769-1874)*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Slamet Saksono.1989.*Administrasi Kepegawaian*.Yogyakarta:Yayasan Kanisius.
- Soebijono, A.S.S.Tambunan, Hidayat Mukmin, dan Roekmini Koesoema Astoeti.1992.*Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Politik di Indonesia*.Yogyakarta:UGM Press.

- Soegandhi Soeryo Amindharma.1995.*Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara dan Bangsa*.Jakarta:Paguyuban Para Pelaku Pemerintah RI Balaikota surakarta dalam Pendudukan Tahun 1948-1950.
- S.Silalahi.2001.*Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para PendiriNegara*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartono.W.Pranoto.2001. *Revolusi Agustus Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*.Yogyakarta:Lapera Pustaka Utama.
- Sukardi Sosro Hadi Handojo.1990. *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.Jakarta:Markas Besar ABRI Pusat Senjata dan Tradisi ABRI.
- Sumohatmoko.1940.*Riwayat Mangkunegara I sampai dengan Mangkunegara VII*.Surakarta:Rekso Pustoko.
- Suyatno Kartodirdjo.1993.*Surakarta Dalam Masa Revolusi*.Yogyakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Yayasan Mangadeg.1974.*Tri Darma Tiga Dasar Perjuangan Pangeran Sambernyawa*.Surakarta:Penerbit Seksi Hubungan Masyarakat dan Penerbitan.

Skripsi.

- Budi Daryanto.C0587008.1995. *Struktur Organisasi dan Sistem Manajemen Kepengawain Praja Mangkunegaran Pada Masa Mangkunegara VII*.Skripsi:Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Didik Fitriyanto.2003.*Pertempuran Empat Hari di Kota Surakarta*.Skripsi:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan IPS Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dyah Hayu Rinawati.C0587013.1994.*Dinas Perlindungan Udara (Lucht Beschermings Dienst)*.Skripsi:Fakultas Sastra dan Seni Rupa niversitas Sebelas Maret Surakarta.

LAMPIRAN

- 0 -

- OES OEL2.**

- PERINGATAN.

CXXIV

haroes berani menempoehnja, oleh karena menetapi wadjib.
Para Pegawai haroes dikasih keterangan lengkap, bahwa pegawai itoe perlo
djaga di Istana.
Pendaftaran besoeok pagi diminta (hari Sabtoe) t.t. 24-11-1945, dengan
keterangan 1, jang dapat menjendjata.
2. jang ta' diboetoeuhkan sangat oleh kampoengnja masing2.
Ta' ada jang dibitjarakan lagi, rapat ditoeetoeep dengan slamat pada
djam 11.30.

Mangkoenagaran, 24-11-1945.

Pemoelis,

(Soejarta Hardjasoewarna).